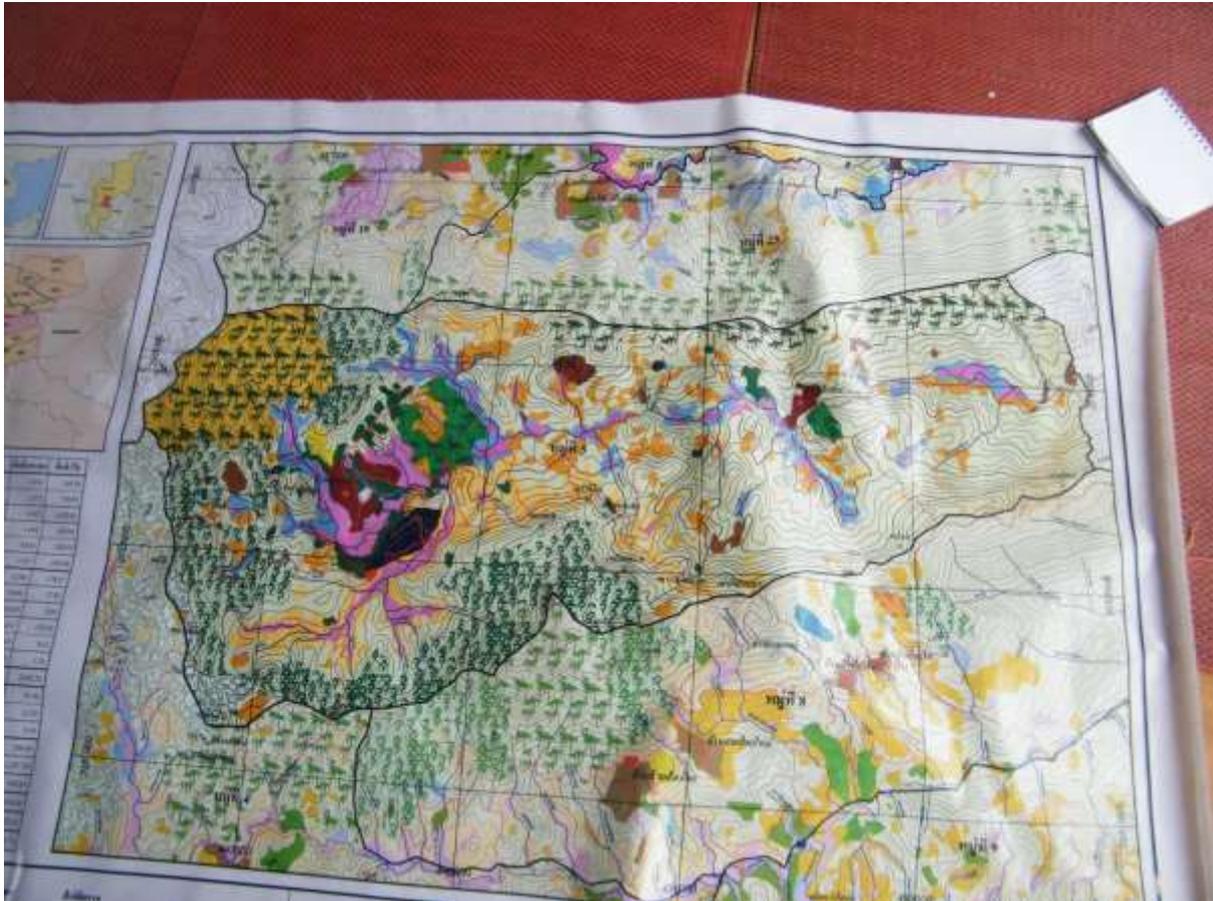


PROTOKOL PEMANTAUAN UNTUK KAWASAN NILAI KONSERVASI TINGGI 5 dan 6



Peta partisipatif yang dibuat komunitas Karen di Chom Thong District, Thailand, dengan dukungan IMPECT, menunjukkan pola penempatan dan pemanfaatan lahan. Foto: Marcus Colchester

DENGAN PEDOMAN PRAKTIK TERBAIK DALAM PELIBATAN MASYARAKAT

2013

Marcus Colchester dan Sophie Chao



Forest Peoples Programme

AKRONIM

ACHPR	African Charter on Human and Peoples' Rights
ACHR	American Convention on Human Rights
CBD	Convention on Biological Diversity
CBD COP	Convention on Biological Diversity Conference Of Parties
CBD PoWPA	Convention on Biological Diversity Programme of Work on Protected Areas
CRC	Convention on the Rights of the Child
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment
FPIC	Free, Prior and Informed Consent
FPP	Forest Peoples Programme
FSC	Forest Stewardship Council
Global GAP	Global Good Agricultural Practice
HCV	High Conservation Value
HCVA	High Conservation Value Area
HCVF	High Conservation Value Forest
HCVIMM	High Conservation Value Identification, Management and Monitoring
HCVMA	High Conservation Value Management Area
ICCA	Indigenous and Community Conserved Area
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICEDAW	International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
ICERD	International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ILO	International Labour Organisation
INDIGENOUS PEOPLE	Indigenous Peoples
IPBES	Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IUCN	International Union for the Conservation of Nature
NTFP	Non-Timber Forest Products
RSB	Roundtable on Sustainable Biofuels
RTRS	Roundtable on Responsible Soy
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
UNESCO	United Nations Economic, Social and Cultural Organisation
UNOHCHR	United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights
WCC	World Conservation Congress

WPC
ZSL

World Parks Congress
Zoological Society of London

DRAFT

DAFTAR ISI

Akronim	2
1. Latar Belakang		
a) Apa Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 dan 6 itu?	5
b) Mengapa HCV 5 dan 6 penting?	5
c) Landasan Berpikir	9
d) Metodologi	10
e) Hasil yang Diharapkan	10
2. Bagaimana HCV 5 dan 6 dikelola?	10
3. Pedoman proses pemantauan HCV 5 dan 6	13
a) Membangun kontak dengan masyarakat	17
b) Pembentukan Tim Pemantau	20
c) Konsultasi masyarakat	22
d) Kerja lapangan dan pemetaan partisipatif	25
e) Pembagian informasi dan validasi informasi	27
4. Pengumpulan data – menuju model-model data	28
5. Input data dan output	48
6. Pelaporan dan verifikasi	48
7. Sumber-sumber lebih lanjut	50
Lampiran I: Contoh kuesioner masyarakat untuk kebutuhan pokok dalam berburu	53
Lampiran II: HCV 5 dan 6 dalam konteks norma internasional	55

Kotak

Siapa yang disebut komunitas lokal dan masyarakat adat?	7
Pentingnya penjaminan luasan daerah yang memadai bagi mata pencaharian masyarakat	8
Identifikasi, pengelolaan dan pemantauan HCV	13
10 tahapan pokok untuk menjamin FPIC masyarakat	15
Status hukum HCV	19
Konflik lahan dan konflik lainnya	20
Kontribusi untuk partisipasi masyarakat dalam Tim Pemantau	22
Pemetaan partisipatif	27

1. LATAR BELAKANG

a) Apa Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 dan 6 itu?

Nilai Konservasi Tinggi adalah nilai-nilai sosial dan lingkungan penting dalam ekosistem dan lanskap yang diidentifikasi bersama oleh proses multi-stakeholder jangka panjang sebagai nilai-nilai penting yang harus dilestarikan dalam pengelolaan sistem alam. Definisi terbaru dari HCV 5 dan 6 yang dikembangkan dan disetujui oleh Forest Stewardship Council (FSC) dan kini juga diadopsi oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah:

HCV 5 – Kebutuhan masyarakat: Tempat-tempat dan sumber-sumber daya mendasar untuk kebutuhan pokok komunitas lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air, dll.), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas-komunitas ini atau dengan masyarakat adat.

HCV 6 – Nilai-nilai budaya: Situs-situs, sumber-sumber daya, habitat dan lanskap yang memiliki kepentingan budaya, arkeologi atau sejarah global atau nasional, dan/atau kepentingan budaya, ekologi, ekonomi atau agama/keramat sangat penting bagi budaya tradisional komunitas lokal atau masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas-komunitas lokal ini atau masyarakat adat.¹

Definisi-definisi ini (bersama dengan definisi HCV 1 hingga 4), yang dikembangkan sebagai pengakuan atas kenyataan bahwa pendekatan HCV kini telah digunakan di luar konteks asli sertifikasi pengelolaan hutan alam dan bahkan di luar sistem sertifikasi, menggantikan definisi sebelumnya yang hanya mengacu pada Hutan Bernilai Konservasi Tinggi. Pendekatan yang telah direvisi ini dengan demikian memberi penekanan pada nilai-nilai itu sendiri yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dan kemudian berusaha untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana yang perlu dikelola untuk memastikan hal ini. Perbedaan utama antara definisi baru dari HCV 5 dan definisi sebelumnya adalah bahwa nilainya terletak dalam mengamankan 'kebutuhan masyarakat' daripada 'kebutuhan dasar masyarakat'. Definisi baru dari HCV 6 kini juga mencakup situs-situs budaya penting global atau nasional, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, selain tempat-tempat yang memiliki kepentingan untuk identitas budaya lokal.

b) Mengapa HCV 5 dan 6 penting?

Konsekuensi yang problematis dari sistem konservasi yang hanya berupaya melindungi nilai-nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem tanpa memperhitungkan hak-hak, mata pencaharian, ambisi dan sistem pengetahuan penduduk lokal, baik itu masyarakat adat atau komunitas lokal, kini telah diakui secara luas. Lembaga-lembaga internasional seperti Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), Kongres Taman Nasional Dunia (WPC) dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) kemudian menyepakati kebutuhan untuk menghormati hak-hak, mengamankan 'pemanfaatan secara adat tradisional', melindungi pengetahuan lokal dan memastikan partisipasi penuh dalam perencanaan pemanfaatan lahan. Kebutuhan ini sudah lama diakui oleh FSC dari pembentukannya di awal tahun 1993 dan

¹ Forest Stewardship Council 2012 *The Revised Principles and Criteria V5*. Available at <https://ic.fsc.org/download/revised-fsc-pc-v-5-0-high-resolution.a-1780.pdf>

juga menjadi pusat pemikirannya ketika memelopori konsep Hutan Bernilai Konservasi Tinggi pada tahun 1998. Sejak saat itu, definisi HCV mencakup nilai-nilai sosial dan lingkungan dan berusaha untuk mempromosikan pemeliharaan dan peningkatan keduanya secara bersamaan.

Tantangan untuk menjaga dan meningkatkan baik nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai lingkungan dalam konteks konversi lahan skala besar untuk monokultur seperti kelapa sawit sangat akut. Apabila kawasan tanah adat yang luas, pemanfaatan secara adat atau subsisten lokal diambil alih untuk perkebunan kelapa sawit, dan kemudian bagian-bagian besar dari wilayah sisanya disisihkan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan lainnya, maka ekonomi masyarakat lokal mau tidak mau akan berada dalam tekanan yang besar, dan dapat berpotensi hancur sama sekali. Tekanan tersebut membawa implikasi penting dan jangka panjang bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang mendiami daerah-daerah tersebut dan bergantung padanya untuk mata pencaharian. Seringkali, lahan-lahan tersebut telah dimiliki, digunakan, dikelola dan diwariskan dari generasi ke generasi sesuai dengan norma-norma dan praktik-praktik adat. Sering juga norma-norma dan praktik-praktik ini adalah sarana yang menjamin mata pencaharian dan memiliki tempat penting dalam identitas sosial dan budaya, serta lembaran sejarah, dari komunitas-komunitas ini. Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan HCV 5 dan 6 yang memadai dengan demikian menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar komunitas-komunitas ini dapat terus dipenuhi, dan identitas budaya dan praktik tradisional mereka dapat dipertahankan.²

Siapa yang disebut komunitas lokal dan masyarakat adat?

Istilah 'komunitas lokal' dapat digunakan untuk merujuk ke sebuah komunitas di tempat tertentu, di mana masyarakat setempat berbagi kepentingan umum di sekitar fasilitas-fasilitas, layanan dan lingkungan setempat (RSB 2010). Seringkali, komunitas lokal menabatkan arti khusus kepada tanah dan sumber daya alam sebagai sumber budaya, adat istiadat, sejarah dan identitas, dan bergantung pada mereka untuk mempertahankan mata pencaharian, organisasi sosial, budaya dan tradisi, kepercayaan, lingkungan dan ekologi mereka. Istilah 'komunitas lokal', sebagaimana dipahami oleh organisasi internasional dan ahli hukum modern mencakup prioritas dalam waktu sehubungan dengan pendudukan dan pemanfaatan suatu wilayah tertentu; kelangsungan nilai-nilai budaya secara sukarela; pengidentifikasian secara mandiri, serta pengakuan oleh kelompok lain, atau oleh otoritas negara, sebagai kolektivitas yang berbeda; dan sebuah pengalaman penaklukan, eksklusi atau diskriminasi, apakah kondisi-kondisi ini masih bertahan atau tidak (Daes 1996). Kedua kelompok ini akan cenderung memanfaatkan dan mengelola lahan sesuai dengan sistem tenurial adat dan hak-hak terkait, dan karenanya harus diperlakukan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dan atas sumber daya alam di dalamnya, terlepas dari apakah hak-hak tersebut bersifat formal atau informal. Standar sukarela seperti RSPO, yang merujuk pada 'masyarakat adat maupun komunitas lokal' mensyaratkan proses dan penghormatan yang sama terhadap hak-hak dari kedua kelompok ini oleh perusahaan anggota RSPO, termasuk terutama dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap hak untuk memberi atau tidak memberi Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan.

² Meskipun Protokol ini berfokus pada HCV 5 dan 6, keterlibatan masyarakat juga harus menjadi bagian dari pemantauan dan pengelolaan HCV 1 sampai 4, mengingat bahwa masyarakat terkena dampak oleh daerah-daerah ini dalam hal akses mereka atas tanah dan sumber daya. HCV 4 juga memiliki dimensi lingkungan maupun sosial, dan relevan bagi komunitas lokal dikarenakan fokusnya pada penyediaan jasa ekosistem dasar dalam situasi-situasi kritis, termasuk namun tidak terbatas pada, perlindungan daerah aliran sungai dan pengendalian erosi. Apabila HCV 1 sampai 6 tumpang tindih, maka sangat penting bahwa masyarakat dan perusahaan bersama-sama memutuskan model pengelolaan yang dapat meningkatkan baik nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai lingkungan dari daerah-daerah tersebut.

Identifikasi dan pengelolaan daerah yang memiliki nilai sosial dan lingkungan yang memadai bagi masyarakat adat dan komunitas-komunitas lokal lainnya, yang dilaksanakan dengan partisipasi penuh mereka dan penghormatan pada hak-hak mereka, juga sejalan dengan berbagai norma-norma internasional dan yurisprudensi yang berkembang, termasuk antara lain, Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Konvensi Organisasi Buruh Internasional No 169 tentang Masyarakat Hukum Adat, Konvensi Organisasi Buruh Internasional No 107 tentang Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Penduduk Tribal dan Semi-Tribal lainnya di Negara-Negara Merdeka, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat, Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional, Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia dan Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Bukanbenda. Lihat Lampiran II untuk analisis yang komprehensif dari HCV 5 dan 6 dalam konteks hukum dan norma-norma internasional.

Pentingnya penjaminan luasan daerah yang memadai bagi mata pencaharian masyarakat

Studi-studi lapangan yang dilaksanakan oleh Forest Peoples Programme di Indonesia telah menunjukkan bahwa sangat sering penilaian HCV hanya mengalokasikan daerah yang sangat kecil sebagai HCV 5 dan 6 dan bahwa sistem-sistem pengelolaan HCV yang ada telah gagal untuk mendapatkan pemahaman, apalagi persetujuan, masyarakat yang terkena dampak. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi yang tidak menguntungkan, yaitu:

- Kebutuhan dasar masyarakat 'tidak dapat dipenuhi pada lahan dan basis sumber daya yang tersisa yang dapat berujung pada kemiskinan, kekurangan gizi, dan kesehatan yang buruk serta kerugian sosial dan budaya yang tidak diinginkan
- Siklus budidaya gilir balik diperpendek yang menyiratkan terjadinya erosi keanekaragaman hayati, tanah yang semakin lemah dan peningkatan erosi
- Dihadapkan dengan kekurangan lahan yang tak dapat diprediksi, petani membuka lahan-lahan marginal atau daerah yang telah disisihkan untuk tujuan-tujuan lain
- Pembukaan lahan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi HCV lain, misalnya apabila sawah-sawah baru dibuka di kawasan hutan tepi sungai (*riparian*), yang disisihkan untuk menjaga aliran air dan kualitas air; atau kawasan lahan gambut, yang disisihkan untuk menghindari emisi karbon tinggi (HCV 4)
- Perburuan atau pertanian juga bisa meningkat di daerah yang disisihkan untuk melestarikan spesies, ekosistem dan lanskap berharga (HCV 1 sampai 3)
- Anggota masyarakat yang miskin atau yang marah dapat mencuri buah dari perkebunan atau petani plasma
- Pertumbuhan penduduk setempat yang tidak terantisipasi menyebabkan kelangkaan dan peningkatan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara yang tidak berkelanjutan
- Hasilnya mungkin adalah sengketa antara perusahaan dan masyarakat yang meluas menjadi konflik yang merusak, tuntutan hukum, kekerasan dan penghancuran properti.

Referensi: Colchester et al 2008; Colchester et al 2011; Colchester & Chao (eds) 2013
(segera terbit)

Penting untuk dipahami bahwa HCV hanyalah satu bagian dari rencana pemanfaatan lahan yang komprehensif yang menjamin keberlanjutan. Dalam konteks konversi lahan, seperti pembangunan perkebunan, alokasi lahan untuk monokultur pasti mengurangi luasan lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lain, termasuk mata pencaharian lokal, pembangunan sosial dan nilai-nilai lingkungan. Apabila hak-hak komunitas lokal dan masyarakat adat terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perubahan-perubahan tersebut, adalah sangat penting, pertama-tama, bahwa hak-hak atas tanah diakui dan, kedua, mereka memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka atas rencana pemanfaatan lahan secara keseluruhan, yang mungkin menyiratkan pembatasan atas hak-hak dan mata pencaharian yang mereka mungkin setuju

demi opsi-opsi pembangunan dan manfaat-manfaat baru.³ Tanpa FPIC untuk rencana pemanfaatan lahan yang diusulkan secara keseluruhan, tawaran negosiasi dan FPIC hanya untuk sisa daerah HCV tidak memberikan masyarakat jaminan yang mereka butuhkan untuk hidup dan budaya mereka. Sebagaimana dijelaskan dengan pedas oleh salah seorang peserta lokakarya:

Kita tidak bisa bicara tentang Nilai Konservasi Tinggi sebagai satu titik merah pada peta, atau dua titik merah pada peta, atau tiga, atau seratus. Seluruh lanskap memiliki nilai konservasi tinggi bagi kami, karena kami memiliki hak adat atas lanskap, dan lanskap tidak dapat dipecah menjadi potongan-potongan kecil, seperti bunga, jika Anda membuang semua kelopakannya dan menyerakkannya, adalah bukan bunga lagi.

Tanah kami diambil dari kami tanpa persetujuan kami dan tanpa konsultasi, dan kemudian Anda meminta kami untuk memberitahu kami dan membantu Anda mengidentifikasi potongan-potongan yang berarti bagi kami. Pikirkan jika itu adalah tubuh Anda sendiri: bagian mana dari tubuh Anda adalah 'Nilai Konservasi Tinggi'? Tidakkah Anda akan mengatakan bahwa itu adalah semua tubuh Anda? Sekarang pikirkan jika saya memuntir lengan Anda, menghanguskan rambut Anda, memotong jari-jari Anda, dan mencungkil mata Anda, dan kemudian meminta Anda, bagian mana dari tubuh Anda yang rusak adalah 'Nilai Konservasi Tinggi', tidakkah Anda masih akan mengatakan bahwa itu semua sangat berharga bagi Anda, bahkan meskipun sebagian besar telah hancur? Jadi itu juga berlaku untuk tanah kami dan hak-hak kami.

c) Landasan Berpikir

Berbeda dengan literatur dan panduan teknis HCV 1 sampai 4, terdapat kekurangan yang besar akan data yang komprehensif dan pedoman praktik terbaik dalam pemantauan dan pengelolaan HCV 5 dan 6. Secara khusus, pentingnya partisipasi, konsultasi dan keterlibatan aktif masyarakat, apabila disepakati oleh masyarakat, dalam pengelolaan dan pemantauan daerah tersebut belum dieksplorasi secara substansial atau diujicobakan di lapangan. Hal ini terjadi meskipun adanya semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa konsultasi dengan dan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tiga tahapan proses HCV dapat menimbulkan hasil positif bagi perlindungan dan peningkatan keseluruhan 6 jenis HCV. Dengan pertimbangan inilah Protokol ini telah dikembangkan untuk HCV 5 dan 6.

Protokol Pemantauan untuk HCV 5 dan 6 telah dikembangkan untuk menyertai Protokol Pemantauan HCV untuk Lanskap Kelapa Sawit yang dikembangkan oleh Zoological Society of London (ZSL), sehingga memastikan keselarasannya dengan Piagam *High Conservation Values Resource Network* (Jaringan Sumber Daya Nilai Konservasi Tinggi), yang berupaya memastikan bahwa sistem HCV dapat menangani keseluruhan 6 jenis HCV. Kedua Protokol ini akan digunakan dalam hubungannya dengan perangkat lunak Alat Pemantauan dan Pelaporan Tata Ruang (SMART).

³ Lihat Forest Peoples Programme 2008 *FPIC and the RSPO: A Guide for Companies*.

d) Metodologi

Protokol ini telah dikembangkan oleh ZSL dan organisasi non-pemerintah hak asasi manusia internasional yang berbasis di Inggris Forest Peoples Programme (FPP).⁴ Sejak tahun 2006, FPP dan mitra-mitranya telah melakukan penelitian lapangan yang ekstensif, dan penelitian tentang implikasi-implikasi sosial dari ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, yang mengadvokasi di sejumlah tingkatan (termasuk RSPO) untuk penerapan praktik terbaik berbasis hak di sektor kelapa sawit. Sejak 2011 FPP dan mitra-mitranya telah melakukan kerja-kerja yang sama di Liberia, Kamerun dan RDK (DRC). Dokumen ini telah direvisi berdasarkan masukan dari dua konsultasi multi-stakeholder yang diselenggarakan di Kamerun dan Indonesia pada tahun 2013.

e) Hasil yang diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dari penerapan Protokol ini adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pihak produsen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau, mengelola dan melestarikan HCV 5 dan 6, dengan potensi untuk memberikan bukti baseline tambahan untuk penilaian ulang HCV 5 dan 6 yang ada
- 2) Penyertaan yang lebih memadai dari HCV 5 dan 6 dalam laporan audit HCV dan kepatuhan terhadap P&C RSPO terkait yang dapat dilaporkan, diverifikasi dan dinilai secara kredibel
- 3) Peningkatan praktik komunikasi dan keterlibatan aktif, jika relevan, dengan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pemantauan dan pengelolaan HCV 5 dan 6
- 4) Peningkatan kapasitas dan pengetahuan dalam perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan melaporkan data-data tentang HCV 5 dan 6 untuk mendapatkan umpan balik bagi praktik pengelolaan
- 5) Peningkatan pengelolaan HCV 5 dan 6 untuk memastikan bahwa peningkatan ini memenuhi fungsi mereka untuk mengamankan kebutuhan dasar dari dan pengembangan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat adat dan komunitas lokal melalui juga penghormatan terhadap hak-hak, mata pencaharian, budaya dan keamanan pangan dan air mereka
- 6) Peningkatan keberlanjutan HCV 5 dan 6 berdasarkan keterlibatan multi-stakeholder dan penghormatan terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, dan yang secara kuantitatif dan kualitatif terukur dan dapat diverifikasi

2. Bagaimana HCV 5 & 6 dikelola?

Pemantauan bukanlah suatu latihan akademis. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik bagi pengelolaan. Apabila ada ancaman baru teridentifikasi, nilai-nilai tidak dapat dipertahankan atau ditingkatkan dan masalah muncul dalam sistem pengelolaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan untuk menangani ancaman, meninjau sistem regulasi, memberi insentif pada perubahan atau memberi sanksi atas pelanggaran. Jenis-jenis sistem pengelolaan dan penguasaan yang

⁴ Forest Peoples Programme bekerja bersama mitra-mitranya untuk mendukung masyarakat adat dan komunitas lokal mengamankan hak mereka atas lahan dan sumber daya alam lewat cara-cara yang dapat menjamin mata pencaharian yang berkelanjutan, kesetaraan dan kesejahteraan mereka berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak, pengetahuan, budaya dan identitas mereka. Untuk informasi lebih banyak silakan kunjungi www.forestpeoples.org.

diadopsi untuk menjaga dan meningkatkan HCV memiliki implikasi besar untuk memilih metode pemantauan terbaik, yang harus menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan yang dipandang bersifat menghukum dan bertentangan dengan kepentingan terbaik dari pihak-pihak yang terlibat tidak mungkin berkelanjutan dalam jangka panjang.

Versi terakhir dari Pedoman Umum Identifikasi HCV yang disusun oleh ProForest dan High Conservation Values Resource Network mengusulkan perlunya untuk:

Membentuk rezim pemantauan yang tepat untuk memastikan agar praktik-praktik pengelolaan efektif dalam tujuan mereka untuk menjaga atau meningkatkan HCV. Rezim pemantauan perlu menerjemahkan tujuan-tujuan strategis dari rezim pengelolaan ke dalam tujuan-tujuan operasional. Indikator-indikator yang tepat harus dipilih untuk menilai status HCV, dan ambang untuk aksi harus dibuat untuk memastikan bahwa HCV dapat dijaga atau ditingkatkan.⁵

Penting untuk dicatat bahwa sistem HCV tidak bersifat menghambat (*proscriptive*) dalam arti bahwa salah satu nilai diberikan kepentingan yang lebih besar dari yang lain. Selain itu, relatif jarang bahwa Daerah Kelola HCV (HCVMA) ditetapkan hanya untuk mempertahankan atau meningkatkan satu HCV saja. Khusus untuk HCV 5 tetapi juga sering untuk HCV 6, sudah biasa atau umum bahwa HCVMA yang ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai ini juga daerah-daerah yang mengandung satu atau beberapa nilai lainnya, yaitu spesies, ekosistem, pemandangan alam dan jasa lingkungan berharga. Tumpang tindih nilai ini memiliki implikasi penting bagi pengelolaan. Dengan demikian, salah satu bagian penting dari rancangan sebuah sistem pengelolaan adalah untuk memastikan bahwa nilai yang majemuk tidak bertentangan dan ini paling baik dapat dipastikan dengan mengalokasikan lahan dan sumber daya yang memadai untuk penyediaan kebutuhan pokok baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang pengguna lokal.

Sistem pengelolaan yang sesuai untuk menjaga dan meningkatkan HCV 5 dan 6 sangat bervariasi. Sangat sering komunitas lokal dan masyarakat adat akan mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya mereka dan akan berusaha agar hak-hak ini dihormati. Hak-hak ini dapat dinyatakan dalam bentuk hukum adat, praktik-praktik tradisional atau norma-norma informal dan mungkin juga diakui dalam hukum nasional, Konstitusi, sistem hak asasi manusia internasional dan melalui praktik-praktik terbaik sukarela dan sistem sertifikasi. Pembatasan atas hak-hak ini di pengelolaan kawasan-kawasan HCV seharusnya hanya tunduk pada persetujuan bebas, diutamakan dan diinformasikan dari masyarakat bersangkutan seperti yang dinyatakan melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Ada empat sistem pengelolaan dasar yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- Daerah kelola masyarakat (misalnya pengelolaan satwa liar bersama masyarakat, pengelolaan zona berburu masyarakat, sertifikasi hutan masyarakat dan perlindungan spesies pohon multi guna masyarakat)
- Daerah kelola negara
- Daerah kelola perusahaan

⁵ Brown et alii 2013 (October) *Common guidance for the identification of High Conservation Values*. HCV Resource Network. <http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/cg-for-hcv-identification>

- Daerah kelola bersama, yang mungkin melibatkan masyarakat dan lembaga negara atau masyarakat dan lembaga perusahaan.

Sistem pengelolaan minimal harus:

- Menetapkan secara jelas daerah yang perlu dilindungi untuk memastikan bahwa nilai-nilainya dapat dipelihara dan ditingkatkan
- Memperjelas pihak hukum yang bertanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola
- Memastikan ancaman-ancaman utama terhadap daerah-daerah bersangkutan
- Menyediakan sistem dan periode evaluasi untuk memantau ancaman-ancaman ini dan menilai apakah nilai-nilai daerah tersebut terpelihara atau ditingkatkan (lihat bagian berikutnya)
- Membangun sistem intervensi yang disepakati untuk melawan ancaman-ancaman, memberi insentif pada praktik-praktik yang direformasi atau pemberian sanksi atas pelanggaran
- Mendokumentasikan aktivitas
- Menyediakan mekanisme untuk menangani keluhan dan menyelesaikan konflik
- Menyediakan mekanisme yang dapat memantau dampak dari tindakan-tindakan pengelolaan
- Terus menerus diadaptasi dari umpan balik pemantauan untuk memastikan hasil yang optimal

Secara optimal suatu lanskap kelola akan mencakup sebuah mosaik rezim pengelolaan dan penguasaan, sebagian berada di bawah kontrol negara langsung, sebagian dikelola oleh perusahaan sebagai bagian dari konsesi mereka dan sebagian berada di bawah penguasaan komunitas yang mungkin diakui atau tidak diakui secara resmi, terdaftar atau memiliki hak/status tergantung pada kemungkinan-kemungkinan dalam sistem hukum lokal dan nasional. Memang sistem pengelolaan sering kali sangat dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh hukum nasional dan praktik-praktik administrasi, yang mungkin memberikan pilihan-pilihan yang relatif terbatas untuk pengakuan atas hak-hak perusahaan maupun hak-hak masyarakat melalui instrumen tenurial dan pengakuan atas personalitas hukum lembaga pengelola. Selain itu, hukum-hukum nasional bisa sangat membatasi sejauh mana perusahaan dapat menyisihkan lahan dalam konsesi mereka untuk konservasi, yang menjadikan penguasaan-penguasaan alternatif seperti daerah yang dikuasai masyarakat adat dan komunitas masyarakat (ICCAS) lebih diperlukan lagi.

Dalam beberapa kasus, pemantauan juga akan mengungkapkan bahwa penilaian HCV awal sendiri memiliki kekurangan – mungkin melewatkan beberapa nilai – atau HCVMA terlalu kecil atau ditetapkan di daerah yang tidak tepat untuk mengamankan nilai-nilai dengan benar (lihat Kotak di halaman 5). Apabila tekanan yang tidak diduga pada sumber daya berasal dari komunitas lokal dalam sistem pengelolaan lahan berbasis persetujuan, penyesuaian-penyesuaian dalam pengelolaan yang mungkin dapat dilakukan dapat mencakup hal-hal berikut:

- Daerah-daerah tambahan disisihkan sebagai HCVMA⁶
- Daerah tanam tambahan dialokasikan sebagai kebun plasma
- Pembagian keuntungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat disepakati untuk mengalihkan tekanan dari sumber-sumber daya primer

⁶ Mungkin hal ini sulit dilakukan dalam kawasan di mana daerah yang disisihkan untuk HCV dan daerah sisanya sudah dikonversi.

- Investasi disediakan untuk mengamankan sumber-sumber alternatif makanan, bahan bakar, air atau uang tunai
- Ekosistem lokal dikelola untuk menghasilkan peningkatan jumlah produk yang disukai, seperti buah-buahan atau hewan buruan
- Pengeluaran HCV dari HGU dengan pengakuan hukum dan dukungan pada pengelolaan masyarakat atas daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah (misalnya sebagai hutan kemasyarakatan)
- Perusahaan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas HCV 5 yang ada melalui praktik pengelolaan yang lebih baik dalam pengelolaan adaptif penyisihan lahan, tunduk pada persetujuan dari masyarakat setelah negosiasi yang menyeluruh

3. PEDOMAN PROSES PEMANTAUAN HCV 5 DAN 6

Identifikasi, pengelolaan dan pemantauan HCV

Proses HCV terdiri dari tiga tahap utama, yaitu **identifikasi**, untuk menentukan apakah sudah ada HCV dan di mana letaknya, yang biasanya dilakukan melalui penilaian HCV yang memerlukan penelitian berbasis literatur (*desk-based*), pengumpulan data, kunjungan lapangan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan; **pengelolaan**, berdasarkan pengembangan rencana pengelolaan untuk menjaga atau meningkatkan HCV dan; **pemantauan**, untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pengelolaan berjalan efektif dalam menjaga atau meningkatkan HCV. Meskipun Protokol ini memberikan panduan mengenai proses pemantauan dan pengelolaan, proses-proses ini tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan dari proses dan hasil identifikasi HCV, mengingat bahwa seberapa jauh identifikasi telah dilakukan secara memadai dan komprehensif memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan dan memiliki potensi dampak atas rencana pemantauan dan pemantauan. Panduan yang diberikan dalam Protokol ini secara umum juga berlaku untuk ketiga tahapan proses HCV, dan harus dibaca dan dilaksanakan dalam konteks/pertimbangan ini.

Pemantauan dirancang untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diidentifikasi dapat dijaga dan ditingkatkan dan bahwa pengelolaan berjalan efektif dan/atau untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan dan ancaman-ancaman terhadap nilai-nilai yang disepakati. Sistem pemantauan dengan demikian harus dirancang melalui keterlibatan partisipatif dengan komunitas lokal dan diadopsi bersamaan dengan atau setelah penunjukan Daerah Kelola HCV (HCVMA) berbasis persetujuan dan kesepakatan-kesepakatan pengelolaan HCV. HCV 5 dan HCV 6 sebagian besar adalah nilai-nilai yang paling dipahami oleh komunitas lokal dan masyarakat adat kepada siapa nilai-nilai itu ditautkan. Fakta bahwa mereka masih ada saat ini sering kali menjadi saksi atas pemanfaatan jangka panjang yang berkelanjutan oleh komunitas lokal yang secara adat telah bergantung pada dan mengelola daerah-daerah tersebut untuk mata pencaharian mereka. Dengan demikian, adalah logis bahwa dalam definisi mereka sendiri, HCV 5 dan 6 digambarkan sebagai situs-situs dan daerah-daerah 'yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas-komunitas lokal atau masyarakat adat' (*vide supra*). Karena HCV 5 dan 6 didefinisikan berdasarkan pengetahuan dan partisipasi komunitas lokal, maka pengetahuan komunitas lokal adalah yang paling siap untuk memastikan apakah nilai-nilai tersebut terpelihara, ditingkatkan atau tererosi.

Partisipasi penuh dan aktif dari masyarakat dalam konsultasi, pembentukan dan kegiatan Tim Pemantauan, kunjungan lapangan, pemetaan partisipatif, berbagi informasi, verifikasi temuan dan mencari opsi-opsi pengelolaan alternatif, dengan demikian penting bagi validitas proses pengelolaan dan hasil HCV 5 dan 6. Meskipun NGO, akademisi, pakar setempat dan pemerintah setempat dapat memberikan informasi yang berguna untuk membantu identifikasi dan pengelolaan HCV 5 dan 6, komunitas lokal perlu dilibatkan dalam proses konsultasi dan menyetujui keputusan melalui proses FPIC. Ini berarti bahwa setiap keputusan atau persetujuan harus dibuat tanpa paksaan atau intimidasi, dengan semua informasi terkait disediakan dan sebelum kegiatan merusak atau intervensi berlangsung. Keterlibatan jangka panjang yang transparan dan berbasis hak dengan masyarakat melalui proses pemantauan HCV 5 dan 6 juga menempatkan perusahaan di posisi yang lebih baik untuk memahami kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai (serta perubahan-perubahan di dalamnya), serta untuk membangun kepercayaan antara para pihak sebagai dasar pendekatan yang sungguh-sungguh multi-stakeholder.

Pedoman dan model data yang diberikan dalam bagian ini berupaya untuk memastikan bahwa proses dipahami dan diimplementasikan dengan cara yang berakar pada, dan kondusif untuk rasa saling percaya, dialog terbuka, kebebasan berekspresi, dan penghormatan terhadap hak-hak, budaya dan mata pencaharian. Konteks, keadaan dan kebutuhan lokal harus selalu dipertimbangkan untuk membentuk model yang digunakan dan bagaimana hal-hal ini perlu disesuaikan, dijabarkan dan/atau direvisi. Konsultasi dengan masyarakat lokal akan memberikan indikasi-indikasi kunci tentang apakah perubahan dibutuhkan dan perubahan apa, dan fleksibilitas dalam menerapkan Protokol ini akan menjadi kunci bagi pengumpulan dan penggunaan data yang efektif dan representatif. Pedoman di bawah ini dengan demikian harus diperlakukan sebagai **contoh yang indikatif dan tidak komprehensif** semata, dari isu-isu potensial yang akan diidentifikasi dan dianalisis dalam pemantauan HCV 5 dan 6. Langkah-langkah yang disarankan ini jangan dipahami sebagai prosedur ‘mencontong’ satu kali saja melainkan proses berulang-ulang dan terus-menerus di mana unsur-unsur tertentu mungkin perlu diulang, diperpanjang atau direposisi dalam proses yang lebih luas, dan di mana keragaman aktor dan perspektif yang terlibat harus diperhitungkan. Informasi pada semua tahapan harus dapat diakses oleh masyarakat yang terlibat secara transparan. Setelah pelaksanaan setiap tindakan, semua aktor perlu berkonsultasi dan rekam jejak yang didokumentasikan perlu disebarluaskan sehingga umpan balik dapat diterima dan langkah-langkah berikutnya dari proses dapat dikembangkan bersama-sama.

10 Tahapan Pokok untuk Menjamin FPIC Masyarakat

(1) Scoping (penjajakan) – adakah komunitas yang mungkin terkena dampak proyek?

Keputusan

Tidak ada komunitas yang akan terkena dampak – tidak dibutuhkan proses FPIC, proses berhenti sampai di sini

Ya, ada komunitas yang akan terkena dampak – proses FPIC dibutuhkan, lanjut ke tahap berikutnya (2)

(2) Datang dan bertemu dengan masyarakat yang mungkin terkena dampak, berikan pengantar, berikan salinan seluruh informasi tentang proyek termasuk peta daerah, proses-proses yang ingin dimulai perusahaan, hak-hak masyarakat dalam proses tersebut, termasuk untuk mendapatkan nasihat (misalnya nasihat hukum), berikan informasi proyek kepada masyarakat, termasuk permintaan bahwa, jika mereka ingin melanjutkan, mereka harus mengidentifikasi struktur perwakilan yang tepat yang bisa mewakili semua kepentingan masyarakat yang berbeda-beda, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda.

Minta persetujuan masyarakat untuk melanjutkan diskusi. Apakah mereka setuju?

Keputusan

Masyarakat mengatakan TIDAK – diskusi berakhir dan tidak ada perkebunan akan dibuka di atas lahan masyarakat.

Masyarakat mengatakan YA – Lanjut ke tahap berikutnya (3)

(3) Identifikasi masyarakat akan perwakilan atau lembaga perwakilan (hindari karyawan perusahaan sejauh mungkin karena, jika tidak, ada potensi konflik kepentingan yang nyata dan dapat dirasakan yang akan merusak kredibilitas proses FPIC).

(4) Berikan perwakilan masyarakat informasi tentang proses perusahaan, termasuk untuk menyetujui persyaratan keterlibatan antara perusahaan dan masyarakat ("aturan main" yang disepakati – misalnya MOU, mungkin untuk ditandatangani – ini harus disetujui oleh penasihat hukum independen), dan kalender proses. Ini akan menentukan bagaimana masyarakat dan perusahaan akan bekerja sama. Panjang waktu dan jumlah kunjungan yang akan dibutuhkan akan tergantung pada konteks dan masyarakat bersangkutan, tetapi dalam semua kasus, harus ada waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mencerna dan merefleksikan informasi yang diterima, berkonsultasi di antara mereka, dan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan klarifikasi atau elaborasi dalam pertemuan-pertemuan tindak lanjutnya.

(5) Bekerja dengan perwakilan masyarakat, melakukan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi lahan masyarakat dan sumber-sumber daya kunci, dan untuk memperbaiki analisis dampak sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kondisi lokal dalam masyarakat tertentu yang bersangkutan. Lakukan ini untuk setiap komunitas (juga ini akan membantu untuk memperbaiki analisis HCV).

(6) Semua hasil (termasuk semua dokumentasi) dari Langkah 5 harus dibagikan kepada seluruh komunitas (termasuk peta untuk validasi, dll.), dan termasuk daerah-daerah yang disepakati (atau diusulkan) di mana pembangunan mungkin dilaksanakan (yang diidentifikasi bersama masyarakat dalam proses pemetaan analisis dampak sosial dan lingkungan partisipatif) dan dihubungkan/tumpang tindih dengan semua daerah adat mereka yang dipetakan. Semua dokumentasi harus ditinggalkan kepada masyarakat dalam bentuk yang dapat diakses semua orang yang bersangkutan – baik laki-laki, perempuan, tua dan muda, dan terutama mereka yang memanfaatkan, menguasai dan mengklaim lahan yang tumpang tindih dengan wilayah proyek.

(7) Masyarakat harus diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan seluruh informasi ini. Proses pengambilan keputusan ini harus melibatkan seluruh komunitas, dan harus ada kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan nasihat (termasuk nasihat hukum).

Keputusan

**Tidak, masyarakat tidak ingin melanjutkan – Tidak ada pembangunan perkebunan
Ya, masyarakat ingin lanjut dengan pembangunan – lanjut ke tahap berikutnya (8)**

Dan jika jawabannya “tidak” maka diskusi dapat dilanjutkan tentang bagaimana proyek dapat dimodifikasi agar mencocoki kedua belah pihak.

(8) Lakukan perundingan formal dengan masyarakat, mengenai pembagian manfaat, perjanjian sewa, rencana kompensasi, "program sosial," jaminan lapangan pekerjaan, dll. Langkah ini berlanjut seiring dengan finalisasi berbagai Prosedur Standar Operasi (SOP) perusahaan, termasuk penanganan penyelesaian konflik/keluhan, dll. Proses ini akan menuju pada elaborasi dari sebuah

KESEPAKATAN

Selama tahap ini, harus ada waktu yang cukup bagi masyarakat untuk merefleksikan seluruh informasi yang diterima. Potensi peran seorang pengamat independen selama proses dan pada tahapan ini pada khususnya (mis. masyarakat sipil, pengacara, pemantau independen) sangat berharga dalam memastikan adanya kesepakatan bahwa hasil-hasil dapat diandalkan oleh seluruh pihak yang terlibat dan secara bulat dipandang memuaskan oleh seluruh pihak yang terlibat. Masyarakat perlu didukung untuk mendapatkan nasihat hukum, harus ada waktu bagi masyarakat untuk bermusyawarah mencapai mufakat dan seluruh masyarakat perlu dilibatkan, terutama mereka yang memanfaatkan lahan atau menguasai lahan secara adat.

Keputusan

Tidak, masyarakat tidak sepakat – Tidak ada pembangunan perkebunan (bahkan pada tahapan akhir ini)

Ya, masyarakat sepakat – lanjut ke tahap berikutnya (10)

(9) Formalisasikan kesepakatan yang dicapai (dengan tanda tangan, persetujuan, dsb.) bersama pemerintah, otoritas adat, dll.

(10) Sampaikan kesepakatan dan pembangunan sesuai rencana yang disepakati kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk dukungan operasional bagi proses pengaduan keluhan, dan audit independen terhadap proses.

a) Membangun kontak dengan masyarakat

Langkah pertama untuk membangun kontak dengan masyarakat adalah mengidentifikasi siapa saja pemegang hak dan pengguna lahan yang ada di daerah sasaran proyek. Ini akan membantu menentukan bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan tanah, serta jenis-jenis klaim yang mungkin diajukan berbagai kelompok atas lahan yang menjadi target serta sumber-sumber daya alam di atasnya, dan siapa yang berhak untuk berkonsultasi dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk proyek. Mengingat bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan oleh perusahaan dalam proses-proses sebelumnya, termasuk dalam identifikasi HCV dan pemetaan partisipatif, tahap ini secara khusus dititikberatkan untuk membangun kontak antara tim HCV dan masyarakat untuk membahas proses pemantauan dan pengelolaan serta komposisi dan peran Tim Pemantau. Jika tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu tentang HCV, atau belum terlibat dalam proses-proses di atas, maka langkah-langkah berikutnya akan dikompromikan. Kurangnya kesadaran atau partisipasi dengan demikian perlu dicatat dan ditangani sebagai elemen penting dari tahapan-tahapan interaksi selanjutnya.

Lihat dokumen-dokumen yang ada termasuk Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan perusahaan, penilaian HCV, survei penguasaan lahan dan sosial, peta-peta partisipatif yang dihasilkan bersama masyarakat, serta sensus-sensus dan sumber-sumber pemerintah terkait. Perhatikan bahwa identifikasi pemegang hak ini harus mencakup semua bagian dari wilayah sasaran proyek serta wilayah di sekelilingnya yang dihuni oleh masyarakat yang mungkin memiliki klaim atau yang secara musiman memanfaatkan lahan dalam wilayah proyek, atau sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas di dalamnya (misalnya air) atau memiliki bentuk-bentuk hubungan penguasaan lain dengan daerah-daerah dalam wilayah sasaran proyek.

Identifikasi perwakilan masing-masing komunitas yang dipilih sendiri sebagai titik kontak pertama. Masyarakat memiliki hak untuk diwakili melalui individu dan lembaga pilihan mereka sendiri, dan yang bertanggung jawab dan memiliki legitimasi kepada orang-orang yang mereka wakili, dalam konsultasi, negosiasi, pengambilan keputusan dan pemberian persetujuan. Ini mungkin berupa lembaga adat, kepala atau tetua masyarakat, koperasi, lembaga administratif lokal, lembaga atau tokoh keagamaan, lembaga baru/campuran, sistem penggantian perwakilan bergilir, atau kombinasi dari yang telah disebutkan di atas. Identifikasi wakil masyarakat dapat dicapai sebagian melalui pernyataan resmi dari masyarakat, yang dilengkapi dengan wawancara samping informal dengan kelompok-kelompok kecil anggota masyarakat. Masyarakat juga harus ditawarkan pilihan untuk memilih pihak ketiga yang independen untuk mendukung mereka dalam berinteraksi dengan perusahaan, seperti NGO lokal atau penasihat hukum, atau pihak netral yang dapat memastikan bahwa seluruh suara dapat dijadikan masukan bagi proses. Namun, adalah penting untuk disadari bahwa mereka yang mengaku mewakili masyarakat mungkin adalah mereka yang memiliki kekuatan yang lebih besar dikarenakan tidak lagi tergantung pada sumber-sumber daya ini, dan yang mungkin malah telah menghabiskan waktu untuk mengembangkan sumber-sumber daya yang berkaitan dengan pengaruh dan kekuasaan di tempat lain. Ketergantungan mereka pada sumber-sumber daya lain ini sering kali membuat mereka sangat buruk untuk diposisikan sebagai wakil masyarakat dalam proses ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung masyarakat untuk mengidentifikasi perwakilan yang memahami dan dapat secara akurat mewakili ketergantungan masyarakat pada sumber daya – termasuk bagaimana laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dll. bergantung pada lahan hutan mereka.

Kunjungi seluruh komunitas secara terpisah dan hindari menyamaratakan mereka semua, bahkan walaupun mereka tinggal berdekatan satu sama lain atau secara geografis sangat dekat. Pemanfaatan dan penguasaan lahan dapat bervariasi bahkan dalam komunitas yang sama, yang mencakup berbagai kelompok etnis. Komunitas tetangga juga dapat menunjukkan pemanfaatan lahan dan mata pencaharian yang berbeda (misalnya, jika yang satu memiliki akses ke sungai dan yang lainnya tidak), dan dengan demikian menjadi penting untuk mengunjungi semua komunitas selama kunjungan pemantauan. Perhatikan juga bahwa mungkin saja ada berbagai jenis pemanfaatan lahan dalam sebuah lanskap, termasuk misalnya pemilik tanah, penyewa tanah, pemberi sewa, pengguna musiman (misalnya dalam pertanian rotasi) dan sebagainya. Masing-masing akan memiliki hak dan klaim atas tanah dan pemanfaatan lahan terkait yang berbeda, yang semuanya harus dipertimbangkan dari tahap awal interaksi dengan masyarakat, untuk memastikan adanya keterlibatan dan pemenuhan kebutuhan semua kelompok.

Informasikan masyarakat sedini mungkin mengenai kunjungan Anda sehingga mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelumnya dan komunikasikan kunjungan ke pada masyarakat yang lebih luas. Izin harus didapat untuk kunjungan-kunjungan ini, jangan mengasumsikan pasti diizinkan atau memaksakan kunjungan, dan waktu serta tanggal pertemuan harus disepakati bersama-sama dengan masyarakat. Salah satu metodologi adalah untuk mengadopsi pendekatan 2 tahap: kunjungan awal yang berupaya mendapatkan izin untuk pertemuan substantif lebih lanjut dan yang memutuskan tanggal dan waktu yang pas untuk itu, yang memungkinkan adanya waktu bagi masyarakat untuk menghubungi, mengundang dan melibatkan anggota yang tinggal di tempat lebih jauh.

Pastikan apakah dan seberapa banyak, masyarakat tahu tentang HCV, dan sediakan informasi dan pelatihan yang diperlukan apabila didapati adanya kekurangan pengetahuan pada mereka. Jika identifikasi HCV dilakukan secara partisipatif dan transparan, maka kemungkinan terjadinya situasi ini dapat dikurangi secara signifikan. Masyarakat harus tahu **setidaknya**: tujuan dari HCV; perbedaan antara HCV 1 sampai 6; siapa yang melakukan Penilaian HCV dan; di mana HCV 5 dan 6 berada. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam Penilaian HCV dan diyakinkan akan keberlanjutan akses yang aman ke HCV 5 dan 6. Ingat bahwa kurangnya pengetahuan tentang HCV itu sendiri dapat menjadi sumber sengketa dan akhirnya konflik, apabila masyarakat tidak yakin seperti apa hak-hak mereka terkait pemanfaatan, akses, dan kepemilikan atas HCV ini, siapa yang mengidentifikasi daerah-daerah ini, bagaimana, untuk apa, untuk berapa lama. Karena alasan ini, Protokol ini menganggap 'pengetahuan masyarakat tentang HCV' sebagai sebuah nilai, dan kurangnya pengetahuan sebagai ancaman. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat (tidak hanya anggota Tim pemantau) untuk memahami dan terlibat dalam proses pemantauan dan pengelolaan HCV mungkin diperlukan untuk memperbaiki kekurangan ini, baik oleh perusahaan atau pihak ketiga yang independen, dan penilaian ulang HCV apabila didapati bahwa penentuan lokasi HCV kurang atau tidak memadai.

Status hukum HCV

Adalah penting untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang status HCV dalam konteks nasional tertentu di mana Protocol ini digunakan. Ini termasuk: apakah HCV diakui dalam hukum nasional; jika tidak, apakah ada peraturan perundangan yang dapat atau telah ditafsirkan sebagai penunjang konsep HCV; apakah reformasi hukum terhadap pemasukkan HCV ke dalam peraturan nasional atau daerah atau dalam perencanaan tata ruang kabupaten setempat tengah berjalan dan sebagainya. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengkontekstualisasikan konsep ini dalam kerangka hukum yang ada di samping kerangka sertifikasi standar sukarela.

Jelaskan dengan jelas dan secara sederhana tujuan dari kunjungan pemantauan dan pembentukan Tim Pemantau. Dokumen terkait proses pemantauan (misalnya Protokol, peta-peta, surat-surat) harus diterjemahkan (bila perlu) dan dibagikan dalam bentuk *hard copy*, dengan waktu yang cukup diberikan kepada masyarakat untuk membaca dan mencerna informasi, dan kembali dengan pertanyaan atau klarifikasi. Juga jelaskan tindak lanjut apa yang akan dilakukan setelah kunjungan dalam kesepakatan dengan masyarakat. Apabila konflik lahan dan sosial telah dilaporkan, adalah penting untuk menjelaskan apa yang **tidak** tercakup dalam pemantauan kunjungan atau apa yang **tidak** mampu dicapai lewat kunjungan lapangan, untuk menghindari timbulnya harapan yang tidak semestinya di kalangan masyarakat.

Bawa dokumen terkait untuk berbagi dengan masyarakat. Hal ini dapat mencakup HCVA, peta HCV, P&C RSPO, pedoman HCV 5 dan 6, komitmen tambahan, SOP, Kode Etik, atau kebijakan CSR pada HCV dari perusahaan. Salinan dokumen-dokumen ini harus diberikan kepada masyarakat untuk mereka konsultasikan secara independen di luar pertemuan.

Laksanakan konsultasi masyarakat di desa-desa terkait, bukannya membawa anggota masyarakat ke kota-kota sekitar atau pusat perkotaan. Masyarakat sering merasa lebih nyaman untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka dalam suasana mereka sendiri. Jika pertemuan harus diadakan di tempat lain, Tim Pemantau atau sponsor harus menutupi biaya transportasi dan akomodasi bagi anggota masyarakat yang hadir.

Bawa dan tunjukkan kartu pengenal kepada masyarakat setempat sehingga mereka mengetahui peran dan fungsi anggota Tim Pemantau. Memberikan kartu nama adalah cara informal untuk membangun komunikasi di masa depan jika diperlukan.

Hindari sedapat mungkin membawa senjata atau memakai seragam militer ketika memantau HCV yang dihuni masyarakat adat dan komunitas lokal. Hal ini terutama berlaku di daerah-daerah dengan banyak konflik – memasuki daerah-daerah seperti itu dengan membawa senjata dapat menyebabkan ketakutan dan kepanikan di pihak masyarakat, terutama di mana sebelumnya sudah ada preseden pasukan keamanan bersenjata yang disewa oleh perusahaan untuk menangani konflik. Datang ke daerah-daerah seperti itu dengan membawa senjata sebenarnya dapat meningkatkan peluang terjadinya kekerasan reaktif dari masyarakat dan tidak kondusif bagi kepercayaan atau kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam konsultasi di tingkat lapangan.

Konflik lahan dan konflik lainnya

Apabila ada konflik di masa lalu atau yang sedang berlangsung antara masyarakat dan perusahaan di perkebunan, konflik-konflik ini pasti akan mempengaruhi bagaimana masyarakat mempersepsikan dan terlibat atau tidak terlibat dalam proses pemantauan dan pengelolaan HCV. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik lahan akan menjadi perhatian utama masyarakat, dan oleh karena itu Tim Pemantau akan perlu untuk bersama-sama masyarakat mengidentifikasi cara-cara agar proses pemantauan dan pengelolaan HCV yang lebih baik dapat menuju pada resolusi, mitigasi, pencegahan dan/atau peredaman konflik tanah jikalau memungkinkan.

Perhatikan juga bahwa apabila tanah telah dibebaskan oleh perusahaan tanpa menghormati FPIC, atau apabila konflik dan keluhan muncul dari operasi perusahaan dan aktivitas-aktivitas operator-operator sebelumnya di daerah tersebut, maka HCV akan dianggap sebagai kompromi jika dilihat dari perspektif masyarakat. Meskipun hal ini membuatnya bahkan lebih penting bahwa masyarakat harus sepenuhnya terlibat dalam proses pemantauan dan pengelolaan HCV, sebagian untuk memperbaiki situasi ini, yang paling sering terjadi adalah proses restitusi dan ganti rugi tanah yang lebih luas untuk masyarakat yang terkena dampak akan diperlukan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Banyak masyarakat juga akan memiliki hak adat atas lanskap dan wilayah yang di dalamnya terletak situs-situs bernilai tertentu, dan konteks ini perlu diakui dan dihargai oleh Tim Pemantau.

Pertimbangan sederhana, misalnya tidak melibatkan militer atau aparat keamanan selama konsultasi dan pemantauan, mengacu pada Tim sebagai Tim Pemantau bukannya Tim Patroli, dan menghindari membawa senjata apapun, dapat membuat perbedaan besar dalam menghindari intimidasi, mendorong dialog terbuka dan membangun kepercayaan masyarakat untuk terlibat dengan perusahaan. Rasa saling percaya adalah kunci keberhasilan: membangun rasa saling percaya ini akan banyak tergantung pada pengalaman masyarakat sebelumnya dengan operator yang sama atau yang sebelumnya di daerah mereka. Ingat bahwa membangun kembali kepercayaan jauh lebih sulit daripada membangun kepercayaan dari awal.

b) Pembentukan Tim Pemantau

Apabila masyarakat memberikan persetujuan mereka untuk kegiatan Tim Pemantau, pertimbangan penting untuk memastikan bahwa hasil-hasil pemantauan dipercaya oleh masyarakat dan perusahaan, dan karenanya dapat ditindaklanjuti dengan efektif, adalah pemilihan Tim Pemantau.⁷ Meskipun kemampuan berhitung dan membaca mungkin menjadi kriteria penting untuk sebagian anggota tim, yang sama berharganya adalah pengetahuan lokal dan sejarah, pengetahuan praktis dari para pengguna sumber daya.

Komposisi optimum dari Tim juga berkaitan dengan siapa para pengelolanya. Dalam hal pengelolaan oleh perusahaan, maka konsultasi rinci harus dilakukan untuk melibatkan anggota masyarakat yang tepat dalam Tim Pemantau. Dalam hal pengelolaan bersama, maka tim harus dipilih dan disepakati bersama-sama oleh kedua belah pihak pengelola. Dalam hal

⁷ Lebih disukai untuk merujuk pada dan mengenalkan konsep Tim sebagai Tim Pemantau daripada Tim Patroli karena istilah 'patroli' mungkin memiliki makna negatif bagi komunitas lokal sebagai kendali, kuasa dan tindakan/paksaan, terutama apabila masyarakat telah memiliki pengalaman buruk sebelumnya dengan aparat polisi, keamanan atau militer.

pengelolaan oleh masyarakat, tetap perlu ada kesepakatan masyarakat luas untuk pemilihan anggota Tim Pemantau.

Capai kesepakatan dengan masyarakat mengenai siapa anggota masyarakat yang akan menjadi bagian dari Tim Pemantau. Proses pembentukan Tim Pemantau mungkin memerlukan lebih dari satu kali konsultasi dengan masyarakat, karena waktu yang memadai harus diberikan bagi mereka untuk mencapai keputusan tentang apakah dan bagaimana mereka ingin terlibat dalam Tim. Mereka yang dipilih harus dipilih secara bebas oleh masyarakat dan idealnya mewakili berbagai perbedaan generasi dalam masyarakat (yaitu tua muda), dan kelompok etnis mayoritas dan minoritas, dan baik laki-laki maupun perempuan, karena variasi-variasi ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif akan nilai kawasan HCV 5 dan 6 untuk berbagai segmen masyarakat bersangkutan.

Capai kesepakatan dengan masyarakat mengenai mandat dan kegiatan Tim Pemantau. Ini harus mencakup masalah keanggotaannya, rincian kontak, jadwal dan frekuensi pertemuan serta jadwal dan frekuensi kunjungan lapangan yang diharapkan, pengaturan logistik (termasuk perhitungan biaya), proses perekaman data dan pelaporan kembali kepada masyarakat luas dan untuk manajer perusahaan, proses untuk revisi keanggotaan dan mandat Tim Pemantau, serta proses untuk berbagi dan memverifikasi temuan. Semua langkah ini harus melibatkan masyarakat baik melalui wakil-wakil yang dipilih masyarakat sendiri dan anggota Tim Pemantau, atau melalui konsultasi masyarakat luas. Keanggotaan bergilir juga dapat dieksplorasi bagi anggota masyarakat yang berbeda untuk terlibat. Sebuah mekanisme keluhan atau pengaduan dan titik kontak untuk ini juga harus disepakati. Masyarakat juga harus disediakan sarana dan informasi untuk menghubungi anggota Tim Pemantau sehingga mereka dapat melaporkan kekhawatiran atas HCV 5 dan 6 secara *ad hoc*, selain kegiatan rutin Tim Pemantau.

Formalisasikan kesepakatan di atas dengan masyarakat luas. Ini bisa berupa dokumen tertulis, upacara ritual, kontrak yang ditandatangani oleh semua pihak di hadapan saksi independen, atau kombinasi dari yang di atas. Dalam semua kasus, masyarakat memiliki hak untuk membuat perjanjian yang mengikat sesuai dengan praktik-praktik adat mereka, jika mereka menghendakinya. Salinan perjanjian harus disediakan untuk semua anggota masyarakat.

Berikan pelatihan kepada masyarakat anggota Tim Pemantau. Ini harus mencakup penggunaan GPS, perangkat lunak SMART, lembar data, kuesioner, kamera, dan peralatan lain yang digunakan. Pelatihan harus disediakan seperti yang dibutuhkan anggota masyarakat, mengingat bahwa mereka mungkin tidak terbiasa dengan alat-alat ini, dan dalam bahasa dan bentuk yang dapat dimengerti mereka. Interpreter mungkin diperlukan apabila dialek lokal digunakan. Harus dipastikan bahwa anggota masyarakat sepenuhnya percaya diri dalam penggunaan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum melakukan kunjungan lapangan dan konsultasi masyarakat. Perhatikan bahwa anggota masyarakat dapat menyarankan perubahan atau perbaikan pada bahan dan metode yang diantisipasi, dan ini harus dipertimbangkan dengan baik dalam revisi dan optimalisasi proses di daerah tertentu yang dimaksud.

Hormati fakta bahwa masyarakat memiliki hak untuk tidak memberikan persetujuan mereka untuk terlibat dalam pemantauan HCV dan proses pengelolaan. Sangat penting bahwa proses-proses yang digambarkan dalam Protokol ini didasarkan pada pengakuan dan penghormatan atas hasil yang mungkin ini, seperti atas akuisisi lahan oleh perusahaan sebelumnya. Apabila masyarakat menolak untuk terlibat, Tim Pemantau harus berusaha

mencari tahu dari mereka tentang alasannya, dan apakah operasi perusahaan sebelumnya atau yang sedang dilaksanakan dan dampak-dampaknya merupakan bagian dari penyebabnya. Ini harus dimasukkan ke dalam rekomendasi yang dihasilkan Tim Pemantau.

Kontribusi bagi partisipasi masyarakat dalam Tim Pemantau

Isu pemberian semacam pembayaran untuk anggota masyarakat yang terlibat dalam Tim Pemantau dapat menimbulkan pertanyaan yang sulit, tergantung pada konteks budaya terkait. Di satu sisi, dalam sebagian konteks budaya (seperti di Indonesia) ini dapat menyebabkan anggota masyarakat merasa memiliki kewajiban kepada perusahaan karena alasan budaya, dan juga kehilangan legitimasi di kalangan komunitas mereka sendiri, atau berujung pada kooptasi dan korupsi. Di sisi lain, masyarakat akan mencurahkan waktu dan energi mereka untuk proses ini, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka, dan kompensasi dalam suatu bentuk bisa menjadi praktik yang bagus. Dalam konteks budaya lainnya (seperti di Kamerun) mungkin dipandang layak bagi perwakilan masyarakat yang menjadi anggota Tim Pemantau untuk menerima imbalan atas waktu dan juga imbalan bagi komunitas mereka. Dalam hal apapun, keputusan seperti itu harus dibuat dengan masyarakat yang bersangkutan secara kolektif, dan bentuk kompensasi perlu dibuat sesuai norma-norma budaya dan tradisi lokal. Di Indonesia, misalnya, bentuk kompensasi ini mungkin dalam bentuk kontribusi perusahaan untuk ritual adat, dan idealnya bukan dalam bentuk pemberian uang. Jika kompensasi uang tunai yang dipilih oleh masyarakat, kompensasi ini mungkin idealnya dibagi di antara masyarakat luas, terutama jika perwakilan masyarakat yang terlibat dalam Tim Pemantau melakukannya secara bergiliran, memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk mengambil peran ini. Apabila perwakilan masyarakat yang menjadi anggota Tim Pemantau memutuskan untuk (dan mampu) membuat peningkatan dalam sistem perusahaan, status mereka akan beralih menjadi karyawan perusahaan, dan anggota masyarakat lain akan berpartisipasi dalam Tim Pemantau sebagai wakil dari masyarakat.

c) Konsultasi Masyarakat

Setelah kontak pertama dengan masyarakat dan kesepakatan dicapai mengenai keanggotaan dan mandat Tim Pemantau, konsultasi, wawancara formal dan semi-formal, dan kunjungan lapangan akan menjadi bagian integral dari pengumpulan data HCV 5 dan 6 dan bagaimana kawasan-kawasa ini dikelola dan dapat dikelola dengan lebih baik.

Berusaha melibatkan seluas mungkin anggota masyarakat dalam konsultasi, karena persepsi dan kebutuhan akan serta hubungan dan pemanfaatan lahan akan berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin dan status berbagai segmen masyarakat. Ini termasuk kelompok orang tua, pemuda, perempuan dan anak-anak. Cobalah untuk mendorong sebanyak mungkin anggota masyarakat tersebut untuk berpartisipasi, daripada membiarkan satu atau dua (umumnya laki-laki) perwakilan tingkat tinggi mendominasi. Namun, mendorong partisipasi multi-stakeholder dari masyarakat itu sendiri harus dilakukan dengan cara yang mencerminkan kepekaan budaya dan penghormatan pada norma-norma dan tradisi lokal. Saran dari sebuah NGO lokal yang akrab dengan budaya dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, atau akademisi dan peneliti, dapat berguna untuk mendapatkan kesadaran akan norma-norma tersebut. Apabila ada kelompok pro dan kontra di dalam dan di antara masyarakat dalam kaitannya dengan operasi perusahaan, sejauh mungkin, partisipasi semua

kelompok harus didorong dalam konsultasi, mengingat bahwa keduanya kemungkinan akan terus bergantung pada HCV 5 dan 6 dan manfaat-manfaat dari perbaikan dalam pemantauan dan pengelolaan kawasan-kawasan tersebut.

Jika norma-norma budaya melarang partisipasi perempuan dalam konsultasi, adakan pertemuan terpisah antara anggota perempuan dari Tim pemantau dan masyarakat perempuan. Di beberapa komunitas, perempuan memiliki ruang mereka sendiri saat berkumpul, entah di tempat umum atau di rumah perempuan tua dengan status laki-laki terhormat. Pilihlah opsi ini daripada mengatur ruang baru untuk diskusi, karena ada kemungkinan bahwa perempuan tidak akan terbiasa dengan konsultasi seperti itu pada awalnya, dan mungkin merasa tidak nyaman berada di lingkungan yang baru.

Hormati jadwal masyarakat sendiri dalam mengadakan konsultasi, untuk memastikan bahwa ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari mereka (misalnya berburu, bertani, istirahat, mandi, berdoa). Hal ini mudah dicapai jika waktu dan tanggal pertemuan diatur bersama-sama dengan masyarakat sedari awal. Putuskan bersama masyarakat tentang frekuensi kunjungan pemantauan. Pada saat yang sama, ada kemungkinan bahwa waktu yang dihabiskan untuk pertemuan-pertemuan tersebut adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan subsisten. Pertimbangkan bagaimana masyarakat dapat secara material mendapatkan imbalan untuk waktu yang dihabiskan dalam pertemuan-pertemuan ini; jika tidak, proses ini malah dapat memiskinkan masyarakat daripada membantu mereka.

Bagi kuesioner kepada masyarakat dalam bentuk dan bahasa yang sesuai. Apabila kebanyakan masyarakat buta huruf, baca kuesioner bersama masyarakat, berikan mereka waktu untuk mencerna informasi ini dan untuk memberi tanggapan. **Gunakan gambar dan diagram untuk menjelaskan konsep-konsep dan ide-ide.** Juga cobalah untuk mendapatkan pandangan masyarakat tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut relevan, apakah ada yang belum tercantum, dan bagaimana kuesioner dapat ditingkatkan untuk memasukkan isu-isu yang penting bagi mereka dengan lebih baik lagi. Dengan kata lain, bertindak fleksibel dengan bahan-bahan yang digunakan untuk menyatakan realitas di lapangan.

Simpan daftar hadir pertemuan, agenda dan catatan pertemuan dan bagikan kepada masyarakat dalam bahasa dan bentuk yang dapat dipahami oleh mereka. Juga pastikan untuk menjelaskan bahwa daftar hadir ini tidak untuk ditafsirkan selain sebagai bukti partisipasi, dan *bukan* bukti persetujuan atas isu tertentu manapun yang dibahas dalam konsultasi.

Dalam mengadakan konsultasi, cobalah berbagai format untuk melihat mana yang hasilnya terbaik. Misalnya, percobaan pertama bisa dimulai dengan konsultasi kolektif besar beberapa desa, diikuti oleh pertemuan-pertemuan tingkat desa, diikuti oleh pertemuan-pertemuan kelompok dalam desa yang sama (misalnya kelompok HCV5, HCV6, kelompok perempuan, kelompok laki-laki, kelompok pemuda, kelompok lansia). Masyarakat sendiri akan memiliki mode konsultasi yang mereka gunakan di antara mereka sendiri, dan ini penting untuk dipertimbangkan ketika menentukan format pertemuan.

Lakukan konsultasi secara lisan tapi bagikan temuan (misalnya, fakta, lembar fakta data dan peta-peta partisipatif manapun yang dihasilkan) kepada masyarakat untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dan juga merasa memiliki proses konsultasi dan hasil-hasilnya.

Uji-silang informasi yang diperoleh dengan menyatakannya dengan cara lain, pengulangan dan triangulasi untuk memastikan keabsahannya. Apabila didapati informasi yang kontradiktif, bicarakan topik tersebut kemudian dalam diskusi, dalam konteks yang berbeda jika memungkinkan, untuk memastikan di mana letak kesalahpahaman.

Rekam konsultasi (suara/video) jika diizinkan masyarakat dan bagikan rekaman-rekaman ini kepada masyarakat. Lakukan hal yang sama dengan pemotretan.

Hindari pertanyaan dengan jawaban ya/tidak, utamakan pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif. Apabila komunitas memiliki budaya lisan dan penyampaian (transmisi) pengetahuan secara oral, Anda mungkin mendapati bahwa anggota masyarakat akan 'membungkus' jawaban mereka dalam narasi yang lebih panjang dan luas, yang bagi mereka relevan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Beri mereka waktu untuk mengembangkan jawaban, jika perlu melalui pertanyaan-pertanyaan pengarah untuk mengarahkan diskusi secara lebih spesifik, namun simpan pertanyaan ya/tidak sampai akhir untuk mengkonfirmasi jawaban-jawaban deskriptif, daripada berupaya mendapatkan jawaban pasti sedari awal.

Berikan waktu dan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses konsultasi. Biarkan mereka berbicara lebih dulu, kemudian fokuskan ke pertanyaan-pertanyaan. Tawarkan masyarakat pilihan untuk bermusyawarah di kalangan mereka sendiri untuk mencerna dan mendiskusikan informasi dan tanggapan-tanggapan mereka.

Selalu tawarkan anonimitas ketika berurusan dengan isu-isu sensitif, seperti konflik lahan, friksi di dalam dan antar masyarakat, konflik dengan perusahaan, laporan pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya. Hal ini terutama sangat penting untuk menghindari hal-hal negatif pada pembocor informasi dan akibatnya keengganan di pihak masyarakat untuk membocorkan informasi tersebut.

Kenakan pakaian sesuai dengan budaya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap budaya dan cara hidup masyarakat. Di banyak masyarakat pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan mengenakan pakaian yang relatif konservatif, dan ada kode etik berpakaian tertentu yang mungkin diharapkan dari perempuan (terutama perempuan muda). Tanyakan hal ini sebelum melakukan kunjungan ke lapangan, karena pakaian yang tepat dapat membuat perbedaan besar untuk memfasilitasi diskusi dan berinteraksi dengan kedua jenis kelamin.

Bawa kontribusi kecil bagi masyarakat pada setiap konsultasi. Gula, kopi, teh atau biskuit – atau, lebih baik lagi, makanan untuk dimakan bersama – yang dapat dikonsumsi selama konsultasi adalah cara yang baik untuk membangun suasana yang ramah dan kondusif untuk dialog. Hindari membuat kontribusi moneter, kecuali memang ada kebutuhan tertentu dari masyarakat, karena kontribusi moneter ini mungkin tidak selalu sampai ke masyarakat luas, dan dapat menciptakan ketegangan di kalangan masyarakat, serta persepsi yang tidak diinginkan bahwa Tim Pemantau 'membeli' masyarakat.

Jika harus menginap di desa, mintalah izin sebelumnya dan berikan kontribusi untuk masyarakat. Barang-barang konsumsi seperti makanan, lilin atau bensin biasanya lebih baik daripada uang.

d) Kerja lapangan dan pemetaan partisipatif

Kunjungan lapangan dan pemetaan partisipatif harus dilakukan oleh Tim Pemantau tetapi masyarakat luas juga harus diajak untuk berpartisipasi, dan semua temuan harus tersedia bagi masyarakat luas.

Bersepakat dengan anggota Tim Pemantau tentang frekuensi dan jadwal kunjungan lapangan yang direncanakan. Ingatlah bahwa beberapa komunitas mungkin mobil, terlibat dalam migrasi musiman tergantung pada moda penghidupan mereka di suatu wilayah. Contoh-contohnya mencakup pemburu-pengumpul, penggembala, petani ladang berpindah dan buruh tidak tetap. Variasi musiman dan kegiatan subsisten masyarakat, juga norma-norma budaya, akan membentuk keputusan-keputusan ini, terutama tentang kunjungan ke situs-situs keramat di HCV 6, jadi bersiaplah untuk bertindak fleksibel.

Terutama apabila mengunjungi HCV 6, mintalah izin dulu kepada masyarakat karena mungkin ada protokol dan norma-norma budaya yang harus diikuti. Orang-orang tertentu mungkin tidak diperbolehkan masuk ke daerah-daerah ini karena alasan budaya atau agama (misalnya, perempuan, anak muda, perempuan yang tengah menstruasi atau hamil, saat festival atau ritual, pemakaman, ritual, dan sebagainya). Setiap ritual saat memasuki atau keluar dari tempat tertentu harus dihormati sesuai dengan norma-norma adat.

Lengkapi anggota Tim Pemantau dengan bahan-bahan/alat-alat yang diperlukan. Hal ini harus mencakup setidaknya unit GPS, lembar data dan alat tulis, teropong, perlengkapan untuk hari-hari berhujan, kamera digital, peta perkebunan dan kawasan HCV, peta-peta partisipatif yang ada, P3K, kompas, senter, parang, perekam audio dan video, dan barang-barang lainnya dipandang perlu oleh masyarakat, mungkin atas dasar tradisi dan keyakinan mereka.

Latih anggota Tim Pemantau untuk menggunakan teknologi geomatika seperti GPS dan GIS. Apabila tingkat melek huruf rendah, gunakan sistem GPS berbasis ikon/piktogram yang menggunakan gambar dan warna-kode dan bukannya teks, sehingga anggota masyarakat tidak dirugikan dalam proses pemetaan. Perangkat lunak telepon pintar menyediakan cara yang murah dan tersedia secara luas untuk melakukan perekaman dan pemetaan data secara bersamaan. Beberapa perangkat lunak juga dapat digunakan untuk melacak rantai kegiatan yang memiliki tanda waktu dan nama (seperti lokasi, individu yang terlibat, tujuan kegiatan, hasil kegiatan dan sebagainya).

Ambil foto bertanda waktu dan tanggal dan buat rekaman audio dan video untuk melengkapi data GPS dan data tertulis. Ada kemungkinan anggota masyarakat akan merasa lebih nyaman dengan mengekspresikan diri secara lisan, dan rekaman video kemudian dapat dibagikan dengan masyarakat untuk memvalidasi temuan.

Pastikan semua anggota Tim Pemantau secara aktif terlibat dalam proses pemantauan. Ini mungkin mencakup rotasi tugas (penggunaan GPS, fotografi, perekaman video, pengisian kuesioner, membuka jalan, dan sebagainya) dan juga akan pastikan bahwa semua anggota Tim Pemantau percaya diri dalam menggunakan bahan yang disediakan untuk merekam data.

Berikan waktu yang cukup kepada masyarakat untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Apabila penjelasan yang diberikan tidak jelas, mintalah klarifikasi melalui contoh-contoh spesifik. Ambil istirahat beberapa kali selama kunjungan

lapangan untuk duduk dan membahas temuan jika diperlukan, dan untuk memastikan semua orang dalam Tim Pemantau sehat dan sepeham dalam kerja dan tujuan (terutama jika Tim dipisah untuk memperluas cakupan daerah kerja).

Sertakan wakil para pemegang hak, termasuk perempuan, kaum muda, keluarga miskin dan orang tua yang representatif, mereka harus dilibatkan dalam pemetaan, karena hal ini akan mencerminkan berbagai nilai, pemanfaatan dan sumber daya yang perlu dicantumkan dalam peta. Sebagai contoh, orang tua seringkali adalah orang yang memiliki pengetahuan paling banyak tentang tempat-tempat yang memiliki kepentingan sejarah dan budaya. Laki-laki dan perempuan mungkin memanfaatkan tanah dan sumber daya secara berbeda. Pengguna sumber daya dengan pengetahuan rinci tentang pola pemanfaatan sumber daya saat ini (seperti pemburu, nelayan, petani, pengumpul hasil alam, praktisi herbal, penggembala, dll.) harus dipertimbangkan dan dilibatkan. Apabila masyarakat bukanlah anggota tim pemetaan secara langsung, mereka harus diajak konsultasi selama proses untuk memastikan bahwa peta yang dihasilkan juga mewakili pemahaman akan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam mereka.

Ingat bahwa kelompok masyarakat yang berbeda (misalnya laki-laki, perempuan, tua, muda) mungkin ingin terlibat dalam kegiatan pemetaan yang terpisah, dan apabila keanggotaan tim pemetaan didasarkan pada berbagai mata pencaharian, etnis, keanggotaan kelompok, maka lebih mungkin lagi bahwa daerah-daerah yang mereka klaim akan berbeda, klaim mereka akan tumpang tindih, dan/atau mereka mungkin memiliki tingkat penguasaan yang tidak sama atas lahan yang sama. Setiap komunitas, dan sub-bagian, harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam proses pemetaan jika mereka ingin terlibat. Apabila masyarakat memiliki hak bersama atas suatu daerah, menegaskan hanya hak-hak satu kelompok cenderung akan menimbulkan konflik. Masyarakat tetangga harus dilibatkan dalam pemetaan batas untuk membangun kesepakatan tentang demarkasi dan untuk memperjelas siapa para pemegang hak. Semua informasi yang dikumpulkan harus ditriangulasi sejauh mungkin (baik di dalam maupun antar masyarakat) untuk konfirmasi dan klarifikasi, dan informasi dari sumber yang berbeda harus dibandingkan untuk dibuktikan dalam rangka mendapatkan ide yang lebih baik tentang situasi keseluruhan di lapangan.

Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif dilakukan oleh masyarakat untuk memetakan wilayah mereka dan menunjukkan tempat dan sumber daya mana yang digunakan untuk tujuan apa (pemanfaatan adat). Peta-peta ini menunjukkan ruang lingkup wilayah adat dan menggambarkan arti dan pentingnya wilayah dan sumber daya terkait bagi kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal. Masyarakat dapat diberi pelatihan penggunaan teknologi GPS dan GIS dan kemudian menerapkan keterampilan ini di lapangan dan digabungkan dengan pengetahuan berbagai pengguna sumber daya yang mengetahui wilayah atau bagian-bagian tertentu dari wilayah tersebut dengan baik. Data dan lokasi dikumpulkan dan semua informasi yang dikompilasi ke dalam peta digital. Semua teknologi diatur di tingkat lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan setempat.

Apabila peta digambar dengan tangan, peta-peta ini perlu diperbaiki (*geo-rectified*) terhadap fitur-fitur geografi yang sebenarnya. Dengan generasi citra satelit saat ini dan spanduk kanvas yang relatif murah dan kokoh, juga memungkinkan untuk mencetak peta desa dan lanskap sekitarnya pada spanduk skala besar dan menggunakannya dalam konsultasi. Apabila tingkat melek huruf rendah, sistem GPS berbasis ikon/piktogram yang menggunakan gambar dan warna-kode dan bukannya teks dapat digunakan, sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam proses pemetaan. Telepon pintar yang dikombinasikan dengan perangkat lunak baru menyediakan cara yang murah untuk pencatatan dan pemetaan data secara bersamaan.

Apabila beberapa peta dibuat oleh komunitas yang berbeda, peta-peta ini harus saling dibandingkan dan data yang dikumpulkan untuk tujuan perbandingan disusun. Peta-peta yang dihasilkan juga harus dibandingkan dengan peta yang ada yang dihasilkan oleh badan-badan pemerintah, NGO dan mungkin perusahaan swasta lainnya yang telah/ sedang beroperasi di dalam dan/atau dekat dengan lokasi proyek. Peta yang dihasilkan harus disediakan bagi masyarakat dan kesepakatan dicapai dengan masyarakat tentang bagaimana pihak lain dapat mengakses peta.

e) Berbagi informasi dan validasi informasi

Setelah menyelesaikan kunjungan lapangan, lakukan pertemuan *de-briefing* dengan Tim Pemantau dan masyarakat luas untuk berbagi temuan. Hal ini dapat dilengkapi dengan berbagi foto dan video yang diambil, rekaman audio dan setiap diagram atau peta awal yang dihasilkan. Capai kesepakatan dengan Tim Pemantau dan masyarakat sebagai langkah tindak lanjut dalam berbagi, memvalidasi dan menggunakan data yang dikumpulkan. Pertemuan verifikasi harus melibatkan berbagai pemegang hak dan pengguna lahan, dan mencakup kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, orang miskin, mereka yang tidak memiliki tanah, dan pemuda. Dalam pertemuan-pertemuan ini, masyarakat harus didorong untuk mengajukan bantahan dan mungkin kebutuhan untuk verifikasi lapangan lebih lanjut. Selalu tawarkan para responden anonimitas dan jaga anonimitas masukan apabila diminta. Salah satu titik kunci di sini adalah bahwa masyarakat luas tidak sekadar diminta untuk memverifikasi temuan-temuan tetapi juga untuk merenungkan apakah temuan-temuan ini mewakili gambaran keseluruhan atau apakah ada aspek-aspek kunci yang belum tercakup, sehingga pengumpulan data lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan agar gambaran yang dihasilkan tidak menyesatkan.

Apabila ada peta yang telah dibuat oleh komunitas yang berbeda, peta-peta ini harus dibandingkan antara satu dengan yang lain dan data yang dikumpulkan untuk tujuan perbandingan disusun. Peta-peta yang dihasilkan juga harus dibandingkan dengan peta-peta yang ada yang dihasilkan oleh badan-badan pemerintah, NGO dan mungkin perusahaan swasta lainnya yang telah/sedang beroperasi di dalam dan/atau dekat lokasi proyek yang menjadi target. Tunjukkan peta kepada seluruh aktor dan sediakan apabila diminta dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami pemohon.

Buat kesepakatan dengan masyarakat untuk memformalisasikan kepemilikan peta dan informasi yang dikumpulkan oleh Tim Pemantau, baik melalui dokumen yang ditandatangani atau bentuk lain yang dapat diterima oleh masyarakat, dan dengan kesepakatan tentang bagaimana pihak lain dapat mengakses informasi ini.

4. PENGUMPULAN DATA – MENUJU MODEL-MODEL DATA

Data dapat dikumpulkan oleh Tim pemantau melalui sejumlah media, yang dapat mencakup kuesioner (lihat contoh dalam Lampiran I), rekaman audio, rekaman video, dan foto-foto bertanda waktu dan tanggal dan peta partisipatif hasil GPS, sebelum memasukkan informasi-informasi ini ke dalam perangkat lunak SMART. Tabel berikut memberikan data indikatif dan tidak komprehensif dan aksi-aksi tindak lanjut yang akan diambil oleh Tim Pemantau, masyarakat dan perusahaan, serta indikator-indikator keberhasilan terkait. Kategori dan kekhawatiran yang teridentifikasi di bawah ini tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan isu-isu setempat yang diidentifikasi dalam proses pemantauan lapangan lokal, dan yang didesain ulang melalui konsultasi dengan masyarakat.

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
1. Perburuan	Jenis dan jumlah hewan buruan yang cukup untuk menopang kebutuhan pokok	<p>Jumlah dan jenis hewan buruan</p> <p>Perhitungan jumlah hewan selama proses transek</p> <p>Metode berburu (senapan, tombak, perangkap, panah) dan perubahannya (meningkat/menurun)</p> <p>Pemanfaatan hewan buruan (mis. makanan, kulit, bulu, pengobatan)</p> <p>Kebutuhan masyarakat untuk masing-masing jenis hewan buruan (per hari/minggu/bulan/tahun) dan perubahannya (meningkat/menurun)</p> <p>Pemanfaatan hewan buruan (subsisten, komersial, atau % masing-masing)</p> <p>Pembatasan adat atas jenis dan jumlah hewan buruan</p>	<p>Berkurangnya jumlah dan jenis hewan buruan</p> <p>Rusaknya habitat dan pencemaran air sebagai penyebab penurunan hewan buruan</p> <p>Tidak cukup kawasan HCV 5 yang diidentifikasi untuk menjamin akses hewan buruan</p> <p>Peningkatan penduduk (karenanya tekanan pada sumber daya)</p> <p>Keamanan pangan berisiko</p> <p>Perburuan gelap dan perampasan sumber-sumber daya masyarakat</p> <p>Konflik dengan pemburu gelap, intimidasi, suap, paksaan dan/atau ancaman atas keamanan pribadi (fisik dan/atau psikologis)</p> <p>Akses terbatas ke HCV 5 (mis. karena adanya larangan masuk ke HCV 1 – 4 yang terletak di jalan menuju kawasan tersebut, papan pengumuman yang melarang perburuan)</p> <p>Perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5 akibat kurangnya</p>	<p>Dikelola masyarakat</p> <p>Dikelola negara</p> <p>Dikelola perusahaan</p> <p>Dikelola bersama</p> <p>Model lainnya</p>	<p>Transek</p> <p>Foto jalur dan sumber daya air yang sudah tidak digunakan</p> <p>Perbandingan jumlah tangkapan saat ini dan di masa lalu</p> <p>Selongsong peluru</p> <p>Bagian-bagian tubuh hewan</p> <p>Perangkap dan jerat</p> <p>Foto deforestasi dan kerusakan habitat hewan</p> <p>Foto pencemaran air</p> <p>Peta partisipatif dari tempat perburuan (saat ini dan masa lalu) dengan penurunan luas daerahnya</p> <p>Akses terbatas ke sungai (mis. papan pengumuman, pagar)</p> <p>Sensus penduduk</p> <p>Foto/rekaman video dari kegiatan perburuan gelap</p> <p>Bukti foto tentang tempat-tempat perburuan gelap, kegiatan perburuan</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10=ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Pemetaan partisipatif HCV 5 (yang diperbarui) bersama komunitas lokal</p> <p>Identifikasi informasi lebih lanjut tentang pemburu gelap (mis. identitas, tempat tinggal)</p> <p>Identifikasi tempat-tempat yang menjadi dan mungkin menjadi lokasi perburuan gelap</p> <p>Pemantauan berkala terhadap lokasi-lokasi perburuan gelap</p> <p>Data-data kontak untuk melaporkan kegiatan ilegal</p> <p>Papan pengumuman yang melarang perburuan gelap dan menerapkan sanksi</p> <p>Tinjau kelemahan dan kekuatan dari model pengelolaan yang ada</p> <p>Tidak ada aksi</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lainnya</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>NGO terkait</p>	<p>Uji-silang bersama masyarakat</p> <p>Uji-silang bersama masyarakat tetangga</p> <p>Transek</p>	<p>Jenis dan jumlah hewan buruan meningkat ke titik cukup</p> <p>Perburuan gelap ditekan dan dihukum</p> <p>Keamanan pangan dijamin</p> <p>Konflik diselesaikan</p> <p>Peta partisipatif yang diperbarui yang menghasilkan lahan yang cukup yang diidentifikasi sebagai HCV 5 untuk menopang kebutuhan berburu</p> <p>Akses ke tempat berburu dijamin</p> <p>Model pengelolaan yang lebih baik dikembangkan</p>	Informasi relevan lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
			<p>kawasan HCV 5</p> <p>Kriminalisasi akibat perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5</p> <p>Perburuan hewan buruan muda akibat penurunan jumlah hewan buruan</p> <p>Perburuan hewan yang sebelumnya tidak diburu akibat penurunan jumlah hewan buruan</p>		<p>gelap</p> <p>Transaksi dan/atau perjanjian dengan pemburu gelap</p> <p>Bukti foto dari intimidasi fisik oleh pemburu gelap</p> <p>Jenis hewan yang diburu pemburu gelap</p> <p>Jumlah hewan yang dibunuh</p> <p>Bukti ke mana hewan tangkapan pemburu gelap dikirim/dijual</p> <p>Bukti kekurangan gizi (mis. pada bayi)</p> <p>Pemetaan menunjukkan tumpang tindih kawasan HCV 5 dengan kawasan HCVA lain akibat akses terbatas</p>						
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
2. Budidaya perikanan	Jenis dan jumlah spesies yang cukup untuk menopang kebutuhan pokok	<p>Jumlah dan jenis ikan</p> <p>Perhitungan jumlah ikan selama proses transek</p> <p>Metode penangkapan ikan (pancing, jaring, perangkap, harpun, racun, listrik) dan perubahannya (meningkat/menurun)</p> <p>Lokasi penangkapan ikan (sungai, DAS) dan</p>	<p>Berkurangnya jumlah dan jenis ikan</p> <p>Rusaknya habitat dan pencemaran air sebagai penyebab penurunan jumlah ikan</p> <p>Tidak cukup HCV 5 yang diidentifikasi untuk menjamin akses penangkapan ikan</p> <p>Akses terbatas ke kawasan HCV 5 (mis. karena adanya larangan</p>	<p>Dikelola masyarakat</p> <p>Dikelola negara</p> <p>Dikelola perusahaan</p> <p>Dikelola bersama</p>	<p>Transek</p> <p>Foto pencemaran sungai</p> <p>Foto ikan yang terkontaminasi</p> <p>Perbandingan jumlah tangkapan ikan saat ini dan di masa lalu</p> <p>Peta partisipatif dari lokasi penangkapan ikan (saat ini dan masa lalu) dengan</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10= ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi dari pelaku di atas</p> <p>Investigasi kualitas air dan adanya pencemaran dan penyebabnya (mis. dalam</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Manajer Lapangan</p>	<p>Uji-silang dengan masyarakat</p> <p>Uji-silang dengan masyarakat tetangga</p> <p>Transek</p> <p>Mengacu ke data pencemaran air</p>	<p>Jumlah dan jenis ikan meningkat ke titik cukup</p> <p>Peta partisipatif yang diperbarui menghasilkan lahan yang cukup yang diidentifikasi sebagai kawasan HCV5 untuk menopang kebutuhan penangkapan ikan</p> <p>Akses ke sungai dijamin</p>	Informasi relevan lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		<p>perubahannya</p> <p>Kebutuhan masyarakat untuk masing-masing spesies (per hari/minggu/bulan/tahun) dan perubahannya (peningkatan/penurunan)</p> <p>Pemanfaatan ikan (subsisten, komersial, atau % masing-masing)</p>	<p>masuk ke kawasan HCV 1 – 4 di jalan menuju kawasan tersebut, papan pengumuman yang melarang penangkapan ikan)</p> <p>Peningkatan penduduk (karenanya tekanan pada sumber daya)</p> <p>Keamanan pangan berisiko</p> <p>Kemungkinan konflik dengan masyarakat tetangga atas akses ke sungai</p> <p>Perambahan ke dalam kawasan bukan HCV akibat kurangnya kawasan HCV 5</p> <p>Kriminalisasi akibat perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5</p> <p>Penangkapan ikan muda akibat berkurangnya jumlah ikan</p>	Model lainnya	<p>penurunan luas daerahnya</p> <p>Sensus penduduk</p> <p>Akses terbatas ke sungai (mis. Papan larangan, pagar)</p> <p>Pemetaan menunjukkan tumpang tindih kawasan HCV 5 dengan kawasan HCVA lain akibat akses terbatas</p> <p>Bukti kurang gizi (mis. pada bayi)</p>		<p>konsesi, kawasan hulu)</p> <p>Pemetaan partisipatif kawasan HCV 5 (yang diperbarui) bersama komunitas lokal untuk menjamin akses ke sungai</p> <p>Dialog dan kesepakatan dengan masyarakat tetangga atas pemanfaatan sungai</p> <p>Tidak ada aksi</p>	<p>Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lainnya</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>NGO terkait</p>	<p>dari sumber-sumber pemerintah</p>	<p>Pencemaran air ditangani dan diatasi</p> <p>Bentuk dan jumlah kompensasi/ganti rugi diberikan untuk hilangnya ikan</p> <p>Model pengelolaan yang lebih baik dikembangkan</p>	
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
3. Peternakan	Lahan penggembalaan dan makanan ternak cukup dan dapat diakses untuk menopang jumlah ternak bagi kebutuhan pokok	<p>Jenis dan jumlah hewan ternak</p> <p>Kontribusi bagi asupan nutrisi masyarakat (per hari/minggu/bulan)</p>	<p>Berkurangnya jenis atau jumlah hewan ternak</p> <p>Pangan dan kegiatan ekonomi terancam</p> <p>Peningkatan penduduk</p>	<p>Dikelola masyarakat</p> <p>Dikelola negara</p> <p>Dikelola</p>	<p>Foto lahan penggembalaan sebelumnya di luar kawasan HCV 5</p> <p>Perbandingan jumlah dan jenis ternak saat ini dan di masa lalu</p> <p>Foto lahan yang mengalami</p>	<p>1= ancaman intensitas rendah</p> <p>10= ancaman intensitas</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer</p>	<p>Uji-silang dengan masyarakat</p> <p>Uji-silang dengan masyarakat tetangga</p>	<p>Peta partisipatif yang diperbarui menghasilkan lahan yang cukup yang diidentifikasi sebagai kawasan HC5 untuk menopang kebutuhan ternak</p> <p>Pencemaran air</p>	Informasi relevan lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		<p>Pemanfaatan hewan ternak (subsisten, komersial, atau % masing-masing)</p> <p>Lokasi dan daerah penggembalaan di dalam kawasan HCV 5 dan perubahannya (meningkat/menurun)</p> <p>Lokasi dan jenis makanan ternak yang tersedia dan dibutuhkan (meningkat/menurun)</p>	<p>dan tekanan terhadap sumber daya</p> <p>Lokasi daerah penggembalaan di dalam kawasan HCV 5 tidak memadai atau diberi batas yang salah</p> <p>Degradasi lanskap akibat penggembalaan berlebihan di daerah-daerah yang lebih kecil</p> <p>Kurangnya daerah penggembalaan dan makanan ternak</p> <p>Pencemaran air yang mempengaruhi hewan ternak</p> <p>Perebutan lahan dengan masyarakat tetangga</p> <p>Akses terbatas ke kawasan HCV 5 (mis. karena adanya larangan masuk ke kawasan HCV 1 – 4 di jalan menuju kawasan tersebut, papan pengumuman yang melarang pemeliharaan ternak/penggembalaan)</p> <p>Perambahan ke dalam kawasan bukan HCV akibat kurangnya kawasan HCV 5</p> <p>Kriminalisasi akibat perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5</p>	<p>perusahaan</p> <p>Dikelola bersama</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>Model lain</p>	<p>penggembalaan berlebihan dan degradasi vegetasi/tanah</p> <p>Foto pencemaran air yang mempengaruhi ternak</p> <p>Foto ternak (kondisi fisik untuk menunjukkan kecukupan asupan gizi)</p> <p>Peta partisipatif daerah penggembalaan (saat ini dan masa lalu) dengan penurunan luas daerahnya</p> <p>Pembatasan akses ke daerah penggembalaan (mis. papan larangan, pagar)</p> <p>Pemetaan menunjukkan tumpang tindih kawasan HCV 5 dengan kawasan HCVA lain akibat akses terbatas</p> <p>Sensus penduduk</p> <p>Bukti perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5</p> <p>Kesaksian adanya kriminalisasi karena perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5</p> <p>Jumlah dan jenis ternak yang dicuri</p> <p>Bukti kurang gizi (mis. pada bayi)</p>	tinggi	<p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Pemetaan partisipatif HCV 5 (yang diperbarui) dengan komunitas lokal untuk menjamin akses ke lahan penggembalaan yang memadai</p> <p>Investigasi kualitas air dan adanya pencemaran dan penyebabnya (mis. dalam konsesi, kawasan hulu)</p> <p>Dialog dan kesepakatan dengan masyarakat tetangga atas pemanfaatan lahan penggembalaan</p> <p>Tidak ada aksi</p>	<p>Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>NGO terkait</p>		<p>ditangani dan diatasi</p> <p>Akses ke lahan penggembalaan dijamin</p> <p>Bentuk dan jumlah kompensasi/ganti rugi disediakan untuk hilangnya ternak</p> <p>Model pengelolaan yang lebih baik dikembangkan</p>	

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
			<p>Pencurian ternak akibat kurangnya lahan penggembalaan</p> <p>Penyakit yang menyerang ternak akibat berkurangnya lahan dan peningkatan intensitas penggembalaan</p>								
4. Pertanian	Lahan pertanian/perladangan dan sumber daya air mencukupi dan bisa diakses untuk menopang berbagai jenis kegiatan pertanian untuk kebutuhan pokok	<p>Jenis tanaman pangan yang ditanam</p> <p>Lokasi tanaman pangan yang ditanam dan jenis ekosistemnya (hutan bera, bakau, rawa, gunung, dataran rendah)</p> <p>Luas total lahan yang ditanami</p> <p>Jumlah masing-masing tanaman pangan yang dihasilkan (per bulan/tahun)</p> <p>Jenis pertanian (mis. pertanian gilir balik, agro-industri, skala kecil)</p> <p>Akses ke sumber daya air</p> <p>Pemanfaatan tanaman pangan (mis. komersial, subsisten, atau % masing-masing)</p> <p>Tujuan tanaman pangan (mis. makanan, perdagangan, kulit kayu,</p>	<p>Penetapan kawasan HCV 5 yang tidak memadai atau tidak tepat untuk menopang kebutuhan pertanian</p> <p>Siklus pertanian gilir balik yang lebih pendek</p> <p>Degradasi lingkungan akibat tingginya kegiatan pertanian di tanah yang semakin kecil</p> <p>Perubahan pada tanaman pangan akibat lahan yang tersedia semakin sempit</p> <p>Melemahnya keamanan pangan dan barter/perdagangan produk pertanian – dan lihat ‘Barter dan Perdagangan’ di bawah</p> <p>Akses terbatas ke sumber air</p> <p>Pencemaran sumber air yang mempengaruhi tanaman pangan</p>	<p>Dikelola masyarakat</p> <p>Dikelola negara</p> <p>Dikelola perusahaan</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>Dikelola bersama</p> <p>Model lain</p>	<p>Sampel tanah dan penilaian kualitas tanah</p> <p>Kesuburan tanah</p> <p>Nilai tanaman pangan yang dihasilkan per ha</p> <p>Sampel air dan penilaian kualitas air</p> <p>Pemetaan partisipatif atas luasan lahan pertanian dalam dan di luar kawasan HCV 5 yang ada</p> <p>Perbandingan jumlah masing-masing tanaman pangan yang dihasilkan (meningkat/menurun)</p> <p>Bukti foto cacat atau penurunan kualitas pada tanaman pangan</p> <p>Perbandingan siklus pertanian gilir balik (meningkat/menurun)</p> <p>Bukti perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10= ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Pemetaan partisipatif HCV 5 (yang diperbarui) dengan komunitas lokal untuk menjamin akses ke lahan pertanian yang ditempatkan secara memadai dan tepat</p> <p>Investigasi kualitas air dan adanya polusi dan penyebabnya (mis. dalam konsesi, kawasan hulu)</p> <p>Dialog dan kesepakatan dengan masyarakat tetangga atas pemanfaatan lahan pertanian</p> <p>Tidak ada aksi</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>NGO terkait</p>	<p>Uji-silang dengan masyarakat</p> <p>Uji-silang dengan masyarakat tetangga</p>	<p>Peta partisipatif yang diperbarui menghasilkan lahan yang cukup yang diidentifikasi sebagai kawasan HCV5 untuk menopang kebutuhan pertanian</p> <p>Pencemaran air ditangani dan diatasi</p> <p>Akses ke lahan pertanian dijamin</p> <p>Bentuk dan jumlah kompensasi/ganti rugi disediakan untuk hilangnya produk pertanian</p> <p>Model pengelolaan yang lebih baik dikembangkan</p>	Informasi relevan lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		buah-buahan, akar, daun, biji, obat-obatan, ritual) Perubahan dalam produksi pertanian (mis. lokasi, jenis dan luas total daerah penanaman berbagai tanaman pangan, hasil panen, perubahan perladangan berpindah) (meningkat/menurun)	Dampak terhadap budaya dan tradisi akibat kurangnya produk pertanian yang digunakan untuk keperluan ritual Perebutan lahan dengan masyarakat tetangga Akses terbatas ke kawasan pertanian HCV 5 (mis. akibat larangan masuk ke kawasan HCV 1 – 4 yang terletak di jalan menuju kawasan tersebut, papan pengumuman yang melarang kegiatan pertanian) Perambahan ke dalam kawasan bukan HCV akibat kurangnya kawasan HCV 5 Kriminalisasi akibat perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5		adanya kriminalisasi karena perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5 Pemetaan menunjukkan tumpang tindih kawasan HCV 5 dengan kawasan HCVA lain akibat akses terbatas Laporan adanya konflik dengan masyarakat tetangga Bukti kurang gizi (mis. pada bayi)						
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
5. Air	Pasokan air memadai, bersih dan dapat diakses untuk menopang berbagai pemanfaatan air untuk kebutuhan pokok	Identifikasi sumber air (mis. sungai, danau, rawa, mata air, sumur) di dalam dan di luar kawasan HCV 5 (&4) Pemanfaatan air (mis. minum, memasak, memancing, transportasi sungai, mandi dan sanitasi)	Pencemaran air Kelangkaan air (mis. saat musim kering atau musim kemarau Kurangnya sumber air di dalam kawasan HCV 5 (&4) yang ada	Dikelola masyarakat Dikelola negara Dikelola perusahaan Dikelola bersama	Sampel air dan uji kualitas mengungkap adanya bahan kimia atau polutan lain (mis. berdasarkan warna, materi yang mengambang, bau, deposit, limbah organik/non-organik padat) Kegiatan di kawasan hulu berkontribusi pada polusi (mis. pabrik, penambangan, pembalakan) Pemetaan partisipatif untuk	1=ancaman intensitas rendah 10= ancaman intensitas tinggi	Oleh Tim Pemantau Oleh perusahaan Oleh masyarakat Oleh pemerintah Oleh pihak ketiga yang terlibat Oleh kombinasi pelaku di atas Tugaskan investigasi kualitas air oleh badan pemerintah terkait	Masyarakat Masyarakat tetangga Manajer Keberlanjutan Pengelola HCV	Uji-silang bersama masyarakat Uji-silang bersama masyarakat tetangga Uji-silang bersama badan pemerintah	Pencemaran air diatasi Kompensasi.ganti rugi disepakati dan disediakan Seluruh jenis pemanfaatan air dijamin Berkurangnya penyakit	Informasi terkait lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		<p>Cara dan kemudahan akses ke pasokan air (mis. jarak dari desa, moda transportasi, biaya) di dalam dan di luar kawasan HCV 5 (&4)</p> <p>Kualitas air di dalam dan di luar kawasan HCV 5</p> <p>Kecukupan pasokan air di dalam kawasan HCV 5 (&4)</p> <p>Sumber dan asal polusi (mis. limbah pabrik, kegiatan di kawasan hulu seperti penambangan, bahan kimia atau pestisida)</p>	<p>Kontaminasi vegetasi air dan tepian sungai</p> <p>Kontaminasi spesies air (mis. ikan, alga, krustasea) – dan lihat ‘Budidaya Perikanan’ di atas</p> <p>Kontaminasi tanaman pangan oleh air yang tercemar – dan lihat ‘Budidaya Perikanan’ di atas</p> <p>Kontaminasi ternak oleh air yang tercemar – dan lihat ‘Peternakan’ di atas</p> <p>Penurunan jumlah hewan buruan akibat air yang tercemar – dan lihat ‘Pemburuan’ di atas</p> <p>Ongkos ekonomi untuk membeli air bersih apabila air bersih tidak tersedia</p> <p>Dampak air yang tercemar pada kesehatan (mis. iritasi kulit, alergi, diare, muntah-muntah)</p> <p>Akses terbatas ke kawasan sumber air (mis. bagian sungai tertentu) (mis. akibat larangan masuk ke kawasan HCV 1 – 4 yang terletak di jalan menuju kawasan tersebut)</p>	Model lainnya	<p>menghasilkan data komparatif tentang lokasi, kelimpahan, akses ke dan kualitas air yang tersedia bagi masyarakat (meningkat/menurun)</p> <p>Jarak antara pasokan air dan masyarakat</p> <p>Foto dan sertifikat kesehatan yang menyatakan masalah kesehatan yang berkaitan air</p> <p>Foto tanaman pangan, ternak dan spesies air yang terpengaruh pencemaran air</p> <p>Foto pembatasan akses ke sumber air (mis. papan pengumuman, pagar)</p> <p>Pemetaan menunjukkan tumpang tindih kawasan HCV 5 dengan kawasan HCVA lain akibat akses terbatas</p> <p>Foto pemanfaatan pasokan air (mis. menangkap ikan, transportasi, mandi, air minum, sanitasi, memasak)</p>		<p>(mis. Kementerian Lingkungan Hidup)</p> <p>Tentukan sumber pencemaran air (mis. limbah pabrik, kegiatan di kawasan hulu dari perusahaan yang sama atau perusahaan lain) dan dialog dengan entitas terkait mengenai pemecahan masalah pencemaran</p> <p>Penyediaan segera pasokan air bersih untuk masyarakat sambil menanti solusi untuk isu pencemaran air</p> <p>Tinjauan kawasan HCV 5 (&4) yang ada untuk mencakup seluruh sumber air yang dibutuhkan (mis. bentang sungai yang lebih panjang, pemasukkan sumber air yang sebelumnya tidak teridentifikasi misalnya mata air)</p> <p>Tidak ada aksi</p>	<p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>NGO terkait</p>	<p>terkait</p> <p>Uji-silang bersama operasi di kawasan hulu (perusahaan sendiri atau entitas lain)</p>	<p>yang diakibatkan oleh/berkaitan dengan air</p> <p>Kegiatan di kawasan hulu dipantau dan diatur untuk menghindari pencemaran air di kawasan hilir</p> <p>Akses ke dan pemanfaatan sumber air dijamin</p> <p>Akses penangkapan ikan, kualitas dan kuantitas ikan dipulihkan</p> <p>Lokasi HCV 5 (&4) dan luasnya direvisi untuk menjamin kebutuhan air</p> <p>Model pengelolaan yang lebih baik dikembangkan</p>	

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
			<p>Pembatasan mobilitas pada transportasi air</p> <p>Pembatasan peluang perdagangan dan barter di mana akses ke sungai dibatasi – dan lihat ‘Barter dan Perdagangan’ di bawah</p>								
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
6. Produksi Energi dan Pertambangan	<p>Penambangan adat dan penambangan modern legal diatur, berkelanjutan dan bebas konflik</p>	<p>Moda produksi energi (mis. penambangan dan penggalian, pengeboran minyak dan gas, secara adat atau modern, legal/ilegal, bahan kimia digunakan/tidak digunakan)</p> <p>Produk tambang (mis. emas, sirkon, batubara, batu karang, pasir, dll.)</p> <p>Pemanfaatan produk tambang (mis. barter, perdagangan, peralatan pemburuan dan penangkapan ikan, utensil, artefak budaya dan peralatan ritual) – dan lihat ‘Barter dan Perdagangan’ di bawah</p> <p>Lokasi dan luas daerah penambangan</p> <p>Status daerah penambangan (mis. aktif, tidak aktif, baru dikembangkan, eksplorasi)</p> <p>Perubahan dalam jumlah masing-masing produk yang diekstrak</p>	<p>Penambangan liar di atas tanah adat dan perampasan sumber daya masyarakat</p> <p>Konflik dengan penambang liar, intimidasi, suap, paksaan dan/atau ancaman terhadap keamanan pribadi (fisik dan/atau psikologis)</p> <p>Penambangan oleh masyarakat luar yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat atau penghormatan terhadap persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan masyarakat (bahkan meskipun kegiatan tersebut legal)</p> <p>Polusi suara, udara dan/atau air akibat kegiatan penambangan</p> <p>Degradasi vegetasi akibat kegiatan penambangan</p> <p>Masalah kesehatan akibat operasi penambangan (mis. dari air yang</p>	<p>Dikelola masyarakat</p> <p>Dikelola negara</p> <p>Dikelola perusahaan</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>Dikelola bersama</p> <p>Model lainnya</p>	<p>Foto lokasi dan kegiatan penambangan (termasuk transportasi produknya)</p> <p>Pemetaan partisipatif dari lokasi dan jenis penambangan (mis. penambangan dan penggalian, pengeboran minyak dan gas, secara adat atau modern, produk tambang dimaksud, aktif, tidak aktif, baru dikembangkan, eksplorasi)</p> <p>Foto produk akhir dari produk yang diekstraksi (mis. utensil, artefak budaya)</p> <p>Pemetaan partisipatif kedekatan lokasi penambangan dengan sumber air (mis. sungai, sumur, rawa, mata air)</p> <p>Sampel air diuji kualitas dan kandungan bahan kimia dari kegiatan penambangan</p> <p>Foto dan titik koordinat GPS dari unit pemrosesan limbah pertambangan</p> <p>Foto dan/atau sampel pencemaran tanah, degradasi vegetasi, kontaminasi pada ikan, hewan buruan, dan ternak akibat operasi penambangan</p> <p>Transaksi dan/atau kesepakatan dengan penambang liar</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10= ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Kumpulkan informasi lebih lanjut tentang penambang (mis. identitas, tempat tinggal, legalitas)</p> <p>Identifikasi lokasi penambangan</p> <p>Pemantauan berkala terhadap lokasi penambangan</p> <p>Data-data kontak untuk melaporkan kegiatan ilegal</p> <p>Papan pengumuman pelarangan penambangan liar dan penerapan sanksi</p> <p>Tidak ada aksi</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>NGO terkait</p> <p>Koperasi atau Serikat</p>	<p>Uji-silang bersama masyarakat</p> <p>Uji-silang bersama masyarakat tetangga jika relevan</p> <p>Uji-silang bersama badan pemerintah terkait</p> <p>Uji-silang bersama operasi penambangan (perusahaan sendiri atau entitas lain)</p>	<p>Moda produksi energi tradisional dijamin untuk seluruh jenis dan pemanfaatan produk hasil ekstraksi</p> <p>Penggunaan bahan kimia diatur dan dipantau untuk menghindari pencemaran air</p> <p>Penilaian kembali kawasan HCV 5 untuk memastikan pencantuman seluruh lokasi penambangan terkait</p> <p>Tidak ada eksplorasi lebih lanjut di luar kawasan HCV 5 yang telah direvisi</p> <p>Penambangan liar ditangani, dilaporkan dan dihentikan</p> <p>Kompensasi/ganti rugi disediakan untuk masyarakat oleh entitas yang bertanggung jawab (mis. penambang, perusahaan, masyarakat</p>	<p>Informasi terkait lainnya</p>

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		(mingguan/bulanan/tahunan) (meningkat/menurun) Kedekatan lokasi penambangan dengan sungai dan DAS Pencemaran air akibat kegiatan penambangan	tercemar) Penurunan jumlah hewan buruan akibat kegiatan penambangan Akses terbatas ke lokasi penambangan sebelumnya (mis. akibat larangan masuk ke kawasan HCV 1 – 4 yang terletak di jalan menuju kawasan tersebut), papan pengumuman yang melarang kegiatan penambangan) Eksplorasi ke dalam kawasan bukan HCV 5 akibat kurangnya identifikasi kawasan HCV 5 untuk menopang kebutuhan pertambangan		Identitas penambang (sektor swasta, perusahaan negara, legal/ilegal, masyarakat) Bukti foto adanya intimidasi fisik oleh penambang liar Kesaksian, transaksi atau bukti foto ke mana produk ilegal dijual/diperdagangkan/diangkut					lainnya) Kegiatan penambangan legal berlanjut dengan FPIC masyarakat Penurunan dalam masalah kesehatan Jumlah hewan buruan dan ikan meningkat Pencemaran suara, air dan udara oleh penambangan mesin ditangani dan dikurangi	
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
7. Kayu	Kuantitas dan jenis kayu memadai dan dapat diakses untuk menopang berbagai pemanfaatan kayu untuk kebutuhan pokok	Jumlah dan jenis kayu yang digunakan (mis. spesies per ha, ditanam atau tanaman utama) Lokasi jenis kayu yang digunakan (mis. tersebar atau terkonsentrasi, hutan, bakau, rawa, dataran rendah) Metode pengumpulan/pengambilan kayu (mis. pakai mesin atau tidak atau % masing-masing) dan perubahannya	Kurang atau terbatasnya akses ke sumber kayu untuk berbagai keperluan dan jenis yang dibutuhkan (mis. akibat larangan masuk ke kawasan HCV 1 – 4 yang terletak di jalan menuju kawasan tersebut) Sebagian daerah sumber kayu tidak dimasukkan dalam kawasan HCV 5 Perebutan dan konflik	Dikelola masyarakat Dikelola negara Dikelola perusahaan Koperasi atau Serikat Dikelola bersama Model lainnya	Pemetaan partisipatif lokasi berbagai jenis kayu yang digunakan Pemetaan partisipatif menunjukkan tumpang tindih kawasan HCV 5 dengan kawasan HCVA lain akibat pembatasan akses Foto pengumpulan dan pemanfaatan kayu Foto pengumpulan kayu secara intensif di tempat-tempat tertentu Foto pengumpulan pohon kayu muda	1=ancaman intensitas rendah 10=ancaman intensitas tinggi	Oleh Tim Pemantau Oleh perusahaan Oleh masyarakat Oleh pemerintah Oleh pihak ketiga yang terlibat Oleh kombinasi pelaku di atas Kumpulkan informasi lebih lanjut tentang pembalok (eg identitas, tempat tinggal, legalitas) Petakan lokasi-lokasi pembalakan	Masyarakat Masyarakat tetangga Manajer Keberlanjutan Pengelola HCV Pengelola Lapangan Perkebunan	Uji-silang bersama masyarakat Uji-silang bersama masyarakat tetangga Uji-silang bersama operator pembalakan (perusahaan sendiri atau perusahaan lain)	Pembalakan liar ditekan HCVA yang direvisi mengidentifikasi daerah-daerah sumber kayu yang memadai untuk masyarakat Konflik antara masyarakat berhenti akibat peningkatan luas HCV 5 yang tersedia Akses masyarakat ke sumber daya kayu dijamin	Informasi terkait lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		(meningkat/menurun) Pemanfaatan kayu (mis. bahan bakar untuk pemanasan/penerangan/memasak, bahan bangunan (mis. tiang, atap), utensil, barter, perdagangan, transportasi seperti perahu, artefak budaya, kayu harum, perlengkapan ritual, obat-obatan atau % masing-masing) dan perubahannya (meningkat/menurun) - dan liat 'Barter' di bawah Kebutuhan masyarakat untuk masing-masing jenis (per hari/minggu/bulan/tahun) dan perubahannya (meningkat/menurun)	dengan masyarakat tetangga akibat kurangnya identifikasi kawasan HCV 5 Perambahan ke dalam kawasan bukan HCV akibat kurangnya kawasan HCV 5 yang tersedia untuk pengumpulan kayu Kriminalisasi akibat perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5 untuk mengambil kayu Pembalakan jenis kayu baru akibat akses terbatas ke kayu (mis. hutan primer, kayu berharga) Pembalakan jenis pohon muda akibat akses terbatas ke kayu Pembalakan liar di tanah adat dan perampasan sumber daya masyarakat Konflik dengan pembalakan liar, intimidasi, suap, paksaan dan/atau ancaman terhadap keamanan pribadi (fiskal dan/atau psikologis) Pembalakan oleh masyarakat luar (bahkan meskipun legal) yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat atau tanpa penghormatan terhadap persetujuan bebas,		atau jenis pohon kayu yang sebelumnya tidak diambil Foto erosi akibat pembalakan yang intensif Informasi tentang pembalakan ilegal (mis. identitas, tempat tinggal, pekerjaan) Sampel air yang tercemar akibat kegiatan pembalakan Foto perubahan metode pengumpulan kayu akibat pemanfaatan yang intensif di daerah yang lebih kecil (mis. yang menggunakan mesin) Foto peningkatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk kebutuhan-kebutuhan berbasis kayu sebelumnya (mis. untuk bangunan, bahan bakar, transportasi) Bukti pembalakan hutan primer yang sebelumnya tidak ditebangi Identitas pembalakan yang teridentifikasi (sektor swasta, perusahaan negara, legal/ilegal, masyarakat)		kunci Pemantauan berkala lokasi-lokasi pembalakan Data-data kontak untuk melaporkan kegiatan ilegal Papan pengumuman melarang pembalakan liar dan penerapan sanksi Dialog dengan masyarakat tetangga tentang pemanfaatan kayu secara bersama untuk menghindari konflik Ganti rugi/kompensasi untuk masyarakat atas hilangnya sumber daya kayu akibat kurangnya identifikasi kawasan HCV 5 Tidak ada aksi	Koordinator Lapangan Tim Pemantau HCV lain Badan pemerintah terkait Koperasi atau Serikat NGO terkait		Metode pembalakan dan pemanfaatan secara adat terjaga (peningkatan terukur di keduanya) Penggunaan kayu oleh masyarakat (mis. barter, bahan bakar, bangunan) terjamin Model pengelolaan yang lebih baik dikembangkan	

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
			<p>didahulukan dan diinformasikan masyarakat (bahkan meskipun legal)</p> <p>Polusi suara dan/atau air akibat kegiatan pembalakan</p> <p>Degradasi vegetasi sekitar akibat kegiatan pembalakan</p> <p>Penurunan jumlah hewan buruan akibat kegiatan pembalakan</p> <p>Mobilitas yang terbatas di mana kelangkaan kayu menghambat pembuatan perahu untuk transportasi</p>								
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
8. NTFP (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Akses berkelanjutan ke, kuantitas dan jenis hasil hutan bukan kayu untuk menopang kebutuhan pokok	<p>Jenis NTFP yang digunakan (mis. karet, madu, tanaman obat, anggrek, buah-buahan, resin, kayu bakar, makanan ternak, kulit pohon, kacang, beri, jamur, ikan)</p> <p>Pemanfaatan NTFP yang diambil (mis. makanan, barter, obat-obatan, ritual, pemanasan rumah) -- dan lihat 'Barter' di bawah</p> <p>Aturan adat tentang pengumpulan dan pemanfaatan NTFP (mis. larangan pengumpulan</p>	<p>Tidak semua daerah yang dibutuhkan untuk mengambil NTFP dipetakan sebagai HCV5</p> <p>Akses terbatas ke kawasan HCV 5 yang ada (mis. akibat larangan masuk ke kawasan HCV 1 – 4 yang terletak di jalan menuju kawasan tersebut)</p> <p>Perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5 untuk mengumpulkan NTFP akibat kurangnya identifikasi</p> <p>Daerah yang diidentifikasi</p>	<p>Dikelola masyarakat</p> <p>Dikelola negara</p> <p>Dikelola perusahaan</p> <p>Dikelola bersama</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>Model lainnya</p>	<p>Pemetaan partisipatif lokasi berbagai daerah NTFP</p> <p>Pemetaan partisipatif menunjukkan tumpang tindih kawasan HCV 5 dengan kawasan HCVA lain akibat pembatasan akses ke NTFP</p> <p>Foto kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan NTFP secara adat</p> <p>Foto peningkatan pengumpulan NTFP di tempat-tempat tertentu</p> <p>Foto pengumpulan NTFP muda atau</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10= ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Petakan tempat-tempat penting pengumpulan NTFP dan meninjau HCVA</p> <p>Dialog dengan masyarakat tetangga tentang pemanfaatan</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator</p>	<p>Uji-silang bersama masyarakat</p> <p>Uji-silang bersama masyarakat tetangga</p>	<p>HCVA yang direvisi mengidentifikasi daerah sumber daya NTFP yang memadai bagi masyarakat</p> <p>Konflik antara masyarakat berhenti akibat peningkatan luas HCV 5 yang tersedia untuk mengumpulkan NTFP</p> <p>Akses masyarakat ke sumber daya NTFP dijamin dan praktis</p> <p>Metode pengumpulan</p>	Informasi terkait lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		<p>NTFP tertentu, periode waktu pengumpulan tertentu, individual tertentu yang dibutuhkan untuk mengambil NTFP, nilai keramat/budaya dari NTFP)</p> <p>Lokasi NTFP yang diambil (mis. hutan, rawa, dataran rendah, gunung, tepi sungai)</p> <p>Anggota masyarakat yang terlibat dalam pengumpulan NTFP (mis. laki-laki, perempuan, anak-anak, pakar ritual, masyarakat lainnya)</p> <p>Frekuensi dan jumlah pengumpulan masing-masing NTFP (mis. sehari/seminggu/sebulan sekali)</p> <p>Perubahan dalam jumlah NTFP yang tersedia (meningkat/menurun)</p> <p>Koperasi atau Serikat untuk mengelola pengumpulan, pemanfaatan dan perdagangan NTFP</p>	<p>sebagai kawasan HCV 5 untuk pengumpulan NTFP ditempatkan secara salah (mis. terlalu jauh dari desa)</p> <p>Keamanan pangan terpengaruh oleh kurangnya NTFP yang dapat dimakan</p> <p>Kemampuan berdagang dan barter menjadi lemah akibat kurangnya NTFP</p> <p>Degradasi lingkungan akibat pengumpulan NTFP yang intensif di daerah yang lebih kecil mengurangi jumlah dan kualitas NTFP</p> <p>Pencemaran air mempengaruhi kualitas dan kuantitas NTFP</p> <p>Perebutan dan konflik dengan masyarakat tetangga atau entitas lain atas NTFP</p> <p>Pembelian, dan bukannya pengumpulan, NTFP terus meningkat</p>		<p>NTFP yang sebelumnya tidak diambil</p> <p>Foto erosi akibat pembalakan yang intensif</p> <p>Informasi tentang pembalakan liar (mis. identitas, tempat tinggal, pekerjaan)</p> <p>Sampel pencemaran air yang mempengaruhi NTFP</p> <p>Foto perubahan metode pengumpulan NTFP akibat peningkatan pemanfaatan di daerah yang lebih kecil (mis. kegiatan yang menggunakan mesin)</p>		<p>NTFP secara bersama untuk menghindari konflik</p> <p>Ganti rugi/kompensasi untuk masyarakat atas hilangnya sumber daya NTFP akibat kurangnya identifikasi HCV 5</p> <p>Model pengelolaan pemanfaatan dan pengumpulan NTFP alternatif atau yang lebih baik (mis. Serikat atau Koperasi)</p> <p>Tidak ada aksi</p>	<p>Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>NGO terkait</p>		<p>dan pemanfaatan NTFP secara adat terjaga (peningkatan yang terukur dalam keduanya)</p> <p>Model pengelolaan dan pengumpulan NTFP yang lebih baik dikembangkan</p>	
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
9. Barter dan perdagangan	Akses yang memadai dan berkelanjutan ke barang barter dan barang dagang dan ke pasar untuk	Jenis barang yang dibarter dan diperdagangkan (mis. kayu, NTFP, ikan, hewan buruan, mineral, batubara) dan perubahannya	Akses terbatas ke pasar untuk barter dan perdagangan (mis. batas fisik, HCVs 1 – 4 yang terletak di luar batas, kebun)	<p>Dikelola masyarakat</p> <p>Dikelola negara</p>	<p>Peningkatan/penurunan dalam frekuensi, jenis dan jumlah barang-barang yang dibarter dan diperdagangkan</p> <p>Pemetaan partisipatif menunjukkan terbatasnya akses ke kawasan HCV 5</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10=</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p>	<p>Uji-silang bersama masyarakat</p> <p>Uji-silang bersama</p>	<p>Kebutuhan barter dan perdagangan masyarakat dijamin</p> <p>Jenis, jumlah dan frekuensi barter dan</p>	

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
	kebutuhan pokok	<p>(meningkat/menurun)</p> <p>Sumber barang yang dibarter dan diperdagangkan (mis. hutan, sungai, gunung, rawa, danau)</p> <p>Jumlah masing-masing barang yang dibarter dan diperdagangkan (mis. % untuk barter/perdagangan dan % untuk subsisten sendiri) dan perubahannya (meningkat/menurun)</p> <p>Tujuan barter dan perdagangan (memenuhi kebutuhan pokok mis. subsisten, sarana kebersihan pokok, perlengkapan sekolah atau lainnya)</p> <p>Frekuensi barter dan perdagangan (mis. beberapa kali sehari, seminggu/sebulan sekali, kesempatan tertentu saja)</p> <p>Pelaku barter dan perdagangan dalam masyarakat (mis. laki-laki, orang tua, tetua desa, rumah tangga, penjaga toko)</p> <p>Entitas dengan siapa barter dan perdagangan dilakukan (mis. dalam masyarakat, masyarakat lainnya)</p>	<p>Jenis dan jumlah berbagai barang yang dibarter dan diperdagangkan menurun akibat kurangnya akses yang memadai ke kawasan HCV 5 dan 6 untuk mendapatkan barang-barang ini</p> <p>Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari kegiatan barter dan perdagangan (mis. sekolah, higiene, uang, bahan makanan pokok)</p> <p>Pembatasan akses ke sumber-sumber daya yang secara adat dibarter dan diperdagangkan apabila dipandang tidak memenuhi 'kebutuhan pokok'</p>	<p>Dikelola perusahaan</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>Dikelola bersama</p> <p>Model lainnya</p>	<p>atau demarkasi kawasan HCV 5 yang tidak memadai untuk mendukung barter dan perdagangan untuk kebutuhan pokok</p>	<p>ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Pemetaan partisipatif dan revisi HCVA</p> <p>Kesepakatan dengan masyarakat tentang definisi dan tingkat barter dan perdagangan untuk menopang 'kebutuhan pokok'</p>	<p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>NGO terkait</p>	<p>masyarakat tetangga</p>	<p>perdagangan sebelumnya dipulihkan</p> <p>Akses ke kawasan HCV 5 untuk mendapatkan barang-barang untuk barter dan diperdagangkan dijamin</p>	

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		Akses ke pasar untuk barter dan perdagangan (lokasi, jarak, transportasi, biaya) dan perubahannya (meningkat/menurun)									
10. Situs-situs budaya	Akses ke, lokasi yang teridentifikasi, dan pelestarian budaya memadai	<p>Lokasi situs-situs budaya</p> <p>Jenis situs-situs budaya (mis. perkuburan, hutan keramat, kebun obat, tempat ritual (+jenis mis. perkawinan, pemakaman, ritual, pertemuan masyarakat, tempat pemujaan, tempat perburuan keramat)</p> <p>Sifat situs-situs budaya (mis. hutan, lahan terbuka, gunung, lembah, gua, sungai, rawa)</p> <p>Jarak dari desa dan moda akses (mis. jalan kaki, perahu, sepeda motor, kuda) dan perubahannya (waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat-tempat tersebut meningkat/menurun)</p> <p>Pengguna situs budaya (mis. masyarakat, masyarakat lainnya, akses bersama, pakar ritual, orang tua, perempuan, anak-anak, remaja, pakar pengobatan) dan perubahannya</p> <p>Status situs budaya (mis. digunakan secara aktif, tidak aktif, sedang dibangun)</p> <p>Frekuensi kunjungan ke</p>	<p>Tidak seluruh situs budaya dipetakan sebagai HCV 6</p> <p>Akses terbatas ke kawasan HCV 6 yang ada (akibat larangan masuk ke kawasan HCV 1 – 4 yang terletak di jalan menuju kawasan tersebut)</p> <p>Perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 6 untuk membangun situs budaya baru akibat kurangnya identifikasi (mis. perkuburan, tempat perburuan keramat)</p> <p>Penetapan daerah yang diidentifikasi sebagai HCV 6 di lokasi yang salah (mis. Terlalu jauh dari desa)</p> <p>Penjarahan atau pencurian artefak budaya</p> <p>Konflik dengan atau gangguan/intimidasi dari para penjarah</p> <p>Erosi budaya dan spiritual akibat terbatasnya akses ke HCV 6</p> <p>Kerusakan terhadap situs budaya yang ada (mis. akibat pembangunan jalan dan kendaraan, pembukaan lahan,</p>	<p>Dikelola masyarakat</p> <p>Dikelola negara</p> <p>Dikelola perusahaan</p> <p>Dikelola bersama</p> <p>Koperasi atau Serikat</p> <p>Model lainnya</p>	<p>Pemetaan partisipatif situs budaya lama dan baru, jenis, lokasi, luas, pengguna, jarak dari desa dan tipografi</p> <p>Pemetaan partisipatif menunjukkan tumpang tindih kawasan HCV 6 dengan kawasan HCV lainnya akibat terbatasnya akses ke situs-situs budaya</p> <p>Catatan frekuensi pemanfaatan dan perubahannya (meningkat/menurun)</p> <p>Foto kegiatan yang dilakukan di dalam situs budaya apabila diijinkan</p> <p>Foto kerusakan pada situs budaya</p> <p>Foto demarkasi adat dan nonadat dari situs budaya</p> <p>Bukti foto penjarahan (mis. lokasi artefak budaya sebelumnya)</p> <p>Foto daerah-daerah yang bersebelahan dengan situs budaya dan dampak pada kemudahan akses ke situs-situs tersebut (mis. perkebunan, pagar, susunan pembatas (<i>railings</i>), jalan besar)</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10= ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Identifikasi: penjarah (identitas, asal usul), luasan penjarahan, jenis artefak yang dijarah, dan kemungkinan pasar yang menampung barang jarahan tersebut</p> <p>Diskusikan ganti rugi dengan masyarakat yang terkena dampak apabila staf perusahaan terlibat dalam kerusakan kawasan HCV 6</p> <p>Petakan ulang kawasan HCV 6 untuk mengidentifikasi seluruh situs yang memiliki kepentingan budaya di lokasi yang benar</p> <p>Tetapkan daerah penyangga di sekitar kawasan HCV 6 di dalam batas yang disepakati (mis. tidak boleh ada pembukaan lahan/penanaman/pembangunan jalan dalam radius 1 km dari situs)</p> <p>Papan pengumuman untuk menandai batas lokasi kawasan HCV 6 dan hak akses masyarakat</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>NGO terkait</p>	<p>Uji-silang bersama masyarakat</p> <p>Uji-silang bersama masyarakat tetangga</p>	<p>Seluruh situs budaya diidentifikasi secara benar dan akses masyarakat dijamin lewat pemetaan partisipatif</p> <p>Ganti rugi/kompensasi diberikan atas penjarahan atau kerusakan kawasan HCV 6 apabila pihak perusahaan terlibat</p> <p>Daerah penyangga ditetapkan di sekitar kawasan HCV 6</p> <p>Pemanfaatan situs budaya secara adat dijamin (meningkat)</p> <p>Pembatasan adat tentang akses ke dan pemanfaatan situs budaya didokumentasikan dan dibagikan kepada staf perusahaan (mis. lokasi, alasan, waktu)</p> <p>Penjarahan diberi sanksi dan dihentikan</p>	Informasi terkait lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		<p>situs budaya (mis. sehari/seminggu/sebulan /setahun sekali, kesempatan khusus saja) dan perubahannya (meningkat/menurun)</p> <p>Demarkasi situs budaya secara adat dan nonadat (mis. batas alam seperti tepi sungai atau hutan, papan pengumuman, pagar)</p> <p>Situs budaya/spiritual baru yang dibangun (tujuan, lokasi, pengguna, frekuensi kunjungan, demarkasi, tipografi, jarak dari desa)</p>	penanaman, penjarahan								
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
11. Daerah yang memiliki kepentingan nasional dan global	Daerah yang memiliki kepentingan nasional dan global dilestarikan dan ditingkatkan	<p>Lokasi daerah yang memiliki kepentingan nasional/global</p> <p>Jenis daerah (mis. monumen, bangunan, daerah konservasi, daerah pemukiman, sungai, danau, mata air, gunung)</p> <p>Nilai terkait dari daerah dimaksud (mis. ekosistem, keanekaragaman hayati, budaya, agama, sejarah, politik)</p> <p>Jarak dari masyarakat tetangga</p>	<p>Pembatasan akses ke tanah adat akibat penetapan daerah yang memiliki kepentingan nasional/global</p> <p>Hilangnya akses ke mata pencaharian dan sumber daya kebutuhan pokok</p> <p>Biaya terkait akses masuk ke lokasi</p> <p>Situs budaya di dalam daerah dimaksud tidak lagi dapat diakses seperti di masa lalu</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengidentifikasian, pengelolaan dan</p>	<p>Indikator dari pengelolaan oleh masyarakat</p> <p>Dikelola badan Internasional</p> <p>Dikelola negara</p> <p>Dikelola perusahaan</p> <p>Dikelola bersama</p> <p>Koperasi atau Serikat</p>	<p>Peta lokasi dan luas daerah</p> <p>Peta kedekatan daerah dimaksud dengan desa dan basis mata pencaharian masyarakat</p> <p>Foto pembatasan akses masyarakat ke daerah dimaksud</p> <p>Pemetaan menunjukkan pembatasan akses masyarakat ke daerah dimaksud (mis. pagar, pintu masuk, susunan pembatas/railings)</p> <p>Tanda terima bukti biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk memasuki daerah dimaksud</p> <p>Informasi latar belakang tentang nilai daerah dimaksud (mis. dari laporan-</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10= ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Berdialog dengan badan yang bertanggung jawab atas pemantauan dan pengelolaan daerah dimaksud untuk menjamin akses masyarakat</p> <p>Melakukan dialog tentang akses masyarakat ke dan pemanfaatan kawasan HCV 5 dan 6 di dalam daerah dimaksud</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV</p>	<p>Uji-silang bersama masyarakat</p> <p>Uji-silang bersama masyarakat tetangga</p> <p>Uji-silang bersama badan pemerintah terkait</p> <p>Uji-silang bersama badan internasional terkait</p>	<p>Akses masyarakat ke kawasan HCV 5 dan 6 di dalam daerah dimaksud dijamin</p> <p>Badan yang bertanggung jawab atas daerah dimaksud mengetahui dan menghormati hak pemanfaatan dan hak akses masyarakat</p> <p>Ada mekanisme pembagian manfaat bagi masyarakat dari daerah dimaksud</p> <p>Penetapan daerah tidak berdampak negatif terhadap mata pencaharian dan sumber-sumber daya</p>	Informasi terkait lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		<p>Tanggal penetapan</p> <p>Badan yang bertanggung jawab atas penetapan dan pengelolaan daerah dimaksud (mis. badan pemerintah daerah/provinsi/pusat, lembaga internasional, masyarakat, Koperasi atau Serikat)</p> <p>Pengguna situs budaya (mis. wisatawan lokal/asing, anggota masyarakat, peneliti) dan perubahannya</p> <p>Moda akses ke daerah dimaksud (mis. akses bebas, tiket masuk, dibutuhkan izin, pembatasan jumlah pengunjung per hari, pembatasan waktu akses)</p> <p>Status daerah dimaksud (mis. digunakan secara aktif, tidak aktif, sedang dikembangkan)</p> <p>Frekuensi kunjungan ke daerah dimaksud (mis. sehari/seminggu/sebulan /setahun sekali, kesempatan tertentu saja) dan perubahannya (meningkat/menurun) dan oleh siapa (mis. masyarakat, wisatawan, peneliti)</p> <p>Demarkasi adat dan nonadat dari situs budaya (mis. batas alam seperti tepi sungai atau hutan, papan pengumuman,</p>	<p>pembagian manfaat dari daerah dimaksud</p> <p>Penetapan daerah tanpa FPIC</p> <p>Kedekatan daerah dimaksud dengan desa dan kegiatan mata pencaharian mempengaruhi keduanya</p> <p>Eksplorasi berlebihan dari daerah dimaksud oleh pengguna (mis. wisatawan, peneliti)</p> <p>Tumpang tindih dengan kawasan HCV 5 atau 6</p> <p>Gangguan terhadap masyarakat yang berupaya mengakses daerah dimaksud</p>	<p>Model lainnya</p>	<p>laporan, statistic, sumber-sumber pemerintah, sumber-sumber akademis)</p> <p>Akta yang menyatakan tanggal penetapan daerah dimaksud dan lembaga yang terlibat</p> <p>Kesepakatan atas syarat-syarat pengelolaan bersama dengan masyarakat</p> <p>Statistik frekuensi kunjungan dan oleh siapa (peningkatan/penurunan jumlah kunjungan oleh anggota masyarakat)</p> <p>Pemetaan partisipatif menunjukkan tumpang tindih dengan kawasan HCV 5 atau 6 (baik yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi)</p> <p>Foto atau catatan gangguan terhadap masyarakat yang berupaya mengakses daerah dimaksud</p> <p>Kesaksian kepada masyarakat dari aparat keamanan daerah dimaksud tentang ketentuan-ketentuan dan pembatasan akses</p>		<p>Melakukan perundingan tentang ketentuan-ketentuan akses ke kawasan HCV 5 dan 6 di dalam daerah dimaksud (mis. pembayaran, transportasi, frekuensi, izin)</p> <p>Eksplorasi model pengelolaan dan pemantauan daerah alternatif, yang melibatkan masyarakat</p>	<p>lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>Badan internasional terkait</p> <p>NGO terkait</p>		<p>masyarakat</p>	

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		pagar, pintu masuk) Tumpang tindih dengan kawasan HCV lain									
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
12. Kesadaran masyarakat akan HCV	Kesadaran yang luas dari masyarakat akan konsep, tujuan dan lokasi HCV 5 dan 6	Masyarakat memahami konsep HCV (% tentangnya dengan cakupan [tidak memahami, sedikit memahami, cukup memahami, sepenuhnya memahami]) Masyarakat mengerti perbedaan antara HCV 1 – 6 (dengan cakupan untuk masing-masing jenis HCV [tidak memahami, sedikit memahami, cukup memahami, sepenuhnya memahami]) Masyarakat memahami khususnya HCV 5 dan 6 (%dengan cakupan [tidak memahami, sedikit memahami, cukup memahami, sepenuhnya memahami]) Masyarakat mengetahui lokasi HCV 5 dan 6 (% tentangnya dengan cakupan [tidak mengetahui, sedikit mengetahui, cukup mengetahui, mengetahui sepenuhnya]) Masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada tentang akses dan pemanfaatan HCV 1 – 6 (% tentangnya dengan	Tidak ada atau hanya sedikit pemahaman tentang konsep HCV Tidak ada atau hanya sedikit pemahaman tentang perbedaan antara HCV 1 – 6 Tidak ada atau hanya sedikit pemahaman tentang HCV 5 dan 6 secara khusus Tidak ada atau hanya sedikit kesadaran akan lokasi HCV (termasuk HCV 5 dan 6) Tidak ada atau hanya sedikit kesadaran akan model pemantauan dan pengelolaan yang ada Tidak ada partisipasi atau partisipasi terbatas dari masyarakat dalam model pemantauan dan pengelolaan yang ada Kesadaran akan elemen-elemen di atas terbatas hanya pada sebagian masyarakat (mis. hanya pemimpin desa, hanya laki-laki, hanya pekerja perkebunan)	N/A	% anggota masyarakat yang mengetahui dan mampu menjelaskan konsep HCV dengan baik % anggota masyarakat yang mengetahui dan mampu menjelaskan perbedaan antara HCV 1 – 6 % anggota masyarakat yang mampu menjelaskan khususnya tujuan HCV 5 dan 6 % anggota masyarakat yang mengetahui dan mampu menunjukkan lokasi kawasan-kawasan HCV (termasuk HCV 5 dan 6) % anggota masyarakat yang mengetahui dan mampu menjelaskan model pemantauan dan pengelolaan yang ada % anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam dan mampu menjelaskan model pemantauan dan pengelolaan yang ada % anggota masyarakat yang mengetahui dan mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan akses dan pemanfaatan HCV 1 – 6 yang ada % anggota masyarakat yang terlibat dalam HCVA	1=ancaman intensitas rendah 10= ancaman intensitas tinggi	Oleh Tim Pemantau Oleh perusahaan Oleh masyarakat Oleh pemerintah Oleh pihak ketiga yang terlibat Oleh kombinasi pelaku di atas Konsultasi dengan masyarakat untuk menjelaskan konsep, tujuan, lokasi, ketentuan-ketentuan akses dan pemanfaatan dan model pemantauan dan pengelolaan yang ada Pelatihan hukum bagi masyarakat tentang konsep dan derivatif HCV di bawah undang-undang nasional dan daerah Pelatihan hukum bagi masyarakat tentang konsep HCV dalam konteks hukum dan norma internasional Pemetaan partisipatif untuk menjamin revisi HCVA melibatkan masyarakat secara penuh dan berdasarkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan	Masyarakat Masyarakat tetangga Manajer Keberlanjutan Pengelola HCV Pengelola Lapangan Perkebunan Koordinator Lapangan Tim Pemantau HCV lain Badan pemerintah terkait NGO terkait	Uji-silang bersama masyarakat Uji-silang bersama penilai HCV Uji-silang bersama perusahaan Uji-silang bersama badan pemerintah terkait	Masyarakat sepenuhnya memahami konsep HCV Masyarakat berpartisipasi dalam HCVA dan pemetaan partisipatif kawasan HCV 5 dan 6 Masyarakat mengetahui dan berpartisipasi dalam pemantauan dan pengelolaan kawasan HCV 5 dan 6 Masyarakat mengetahui hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan hak-hak derivatif (mis. hak atas pangan, air, tanah, mata pencaharian, perwakilan) Perwakilan yang dipilih masyarakat sendiri terlibat dalam HCVA Penegakan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dijamin Ganti rugi/kompensasi disediakan apabila HCVA yang asli tidak melibatkan masyarakat	Informasi terkait lainnya

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		<p>cakupan [tidak mengetahui, sedikit mengetahui, cukup mengetahui, mengetahui sepenuhnya])</p> <p>Masyarakat mengetahui model-model pemantauan dan mamaj yang ada dari HCV 5 dan 6 (% tentangnya dengan cakupan [tidak ada partisipasi, partisipasi terbatas, cukup partisipasi, partisipasi penuh])</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam model pemantauan dan pengelolaan HCV 5 dan 6 yang ada (% tentangnya dengan cakupan [tidak ada, minimal, bersama secara setara, lebih banyak masyarakat, hanya masyarakat])</p> <p>Partisipasi dalam, validasi dan akses ke HCVA berdasarkan penghormatan terhadap hak masyarakat atas FPIC ((tidak ada, minimal, cukup, penuh))</p> <p>Anggota masyarakat yang terlibat dalam HCVA adalah perwakilan masyarakat yang dipilih sendiri (ya/tidak)</p> <p>Kesadaran akan hak atas FPIC [tidak ada, minimal, cukup, penuh])</p> <p>Rentang sosial anggota masyarakat dengan</p>			<p>% anggota masyarakat yang mampu menjelaskan tujuan, proses, kandungan dan hasil HCVA dengan baik</p> <p>% anggota masyarakat yang mampu menjelaskan konsep FPIC dengan baik</p> <p>Bukti perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5 dan 6 akibat kurangnya pemahaman akan konsep dan lokasi HCV</p>					<p>atau kawasan HCV 5 dan 6 tidak dipetakan dan ditempatkan secara memadai dan benar – dan lihat seluruh poin di atas dalam kaitannya dengan nilai-nilai kawasan HCV ini</p> <p>Perambahan ke dalam kawasan bukan HCV 5 dan 6 berhenti berdasarkan HCVA yang direvisi</p> <p>Model pemantauan dan pengelolaan alternatif dikembangkan yang melibatkan anggota masyarakat secara penuh</p>	

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
		berbagai elemen pengetahuan di atas (mis. perempuan, laki-laki, orang tua, kaum muda, pekerja perkebunan, tetua desa)									
Nilai	Tujuan pemantauan	Metode pemantauan	Kekhawatiran masyarakat	Model pengelolaan yang ada	Bukti	Intensitas (1 - 10)	Rekomendasi aksi	Pelaporan	Verifikasi	Indikator keberhasilan	Catatan
13. Tidak ada pembukaan lahan atau penanaman di kawasan HCV 5 dan 6 oleh perusahaan	HCV 5 dan 6 bebas dari penanaman atau pembukaan lahan oleh perusahaan	<p>Lokasi dan luas daerah di mana pembukaan lahan/penanaman berlangsung</p> <p>Pelaku pembukaan lahan/penanaman (mis. perusahaan, perusahaan lain)</p> <p>Tanggal pembukaan lahan/penanaman</p> <p>Status pembukaan lahan/penanaman (direncanakan, baru, tengah berlangsung, sudah selesai)</p> <p>Kesepakatan dengan masyarakat tentang pembukaan lahan/penanaman (ya/tidak)</p>	<p>Ancaman pada kawasan HCV 5 dan 6</p> <p>Intimidasi atau gangguan dari pelaku penanaman atau aparat keamanan</p> <p>Pembatasan atas ruang hidup, mata pencaharian, kebutuhan pokok dan nilai-nilai sosial budaya</p> <p>Tidak ada pembagian manfaat dari penanaman/pembukaan lahan untuk masyarakat</p> <p>Masyarakat tidak diajak konsultasi dan tidak ada persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebelum pembukaan lahan/penanaman</p>	N/A	<p>Foto dan peta pembukaan lahan/penanaman</p> <p>Kesepakatan dengan masyarakat tentang pembukaan lahan/penanaman berdasarkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan</p>	<p>1=ancaman intensitas rendah</p> <p>10= ancaman intensitas tinggi</p>	<p>Oleh Tim Pemantau</p> <p>Oleh perusahaan</p> <p>Oleh masyarakat</p> <p>Oleh pemerintah</p> <p>Oleh pihak ketiga yang terlibat</p> <p>Oleh kombinasi pelaku di atas</p> <p>Hentikan segera pembukaan lahan/penanaman</p> <p>Ganti rugi/kompensasi untuk masyarakat yang telah kehilangan akses ke kawasan HCV 5 dan 6 akibat pembukaan lahan/penanaman</p> <p>Terapkan sanksi bagi pelaku yang bertanggung jawab atas pembukaan lahan/penanaman</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat tetangga</p> <p>Manajer Keberlanjutan</p> <p>Pengelola HCV</p> <p>Pengelola Lapangan Perkebunan</p> <p>Koordinator Lapangan</p> <p>Tim Pemantau HCV lain</p> <p>Badan pemerintah terkait</p> <p>NGO terkait</p> <p>Koperasi Petani atau Serikat Petani</p>	<p>Uji-silang bersama masyarakat</p> <p>Uji-silang bersama perusahaan (sendiri atau lainnya)</p>	<p>Tidak ada pembukaan lahan/penanaman di kawasan HCV 5 dan 6</p> <p>Ganti rugi/kompensasi disediakan bagi masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama</p>	

5. INPUT DATA DAN OUTPUT

Informasi lengkap disediakan langkah-demi-langkah dalam Modul Pelatihan Perangkat Lunak SMART, yang dapat digunakan bersama Modul Pelatihan Pemantauan Ancaman, dalam rangka untuk melatih staf dengan keterampilan yang dibutuhkan. Input data harus dilakukan setiap hari setelah selesai patrol, jika memungkinkan. Disarankan agar Tim Pemantau dilatih untuk mengunduh GPS dan masukan data ke dalam perangkat lunak SMART di 'Tingkat Pengguna', untuk mencegah kesalahan dalam memasukkan data dan interpretasinya nanti.

Perangkat lunak SMART ini sangat fleksibel dan dapat menghasilkan, antara lain, output-output berikut yang dapat digunakan oleh pengelola HCV dan Tim pemantau:

- Tampilan grafis dari setiap patroli bersama dengan titik referensi navigasi (*waypoints*) ancaman-ancaman yang ditemukan
- Ancaman dan peta distribusi HCV 5 dan 6 yang ditemukan
- Indikator Kinerja Utama untuk staf patroli
- Tabel Rangkuman
- Pertanyaan untuk setiap variabel atau kelompok indikator dengan informasi korelasi
- Laporan yang disertai peta, tabel, skema, tren tingkat penemuan, grafik dan perubahan dari waktu ke waktu

Daftar lengkap dari output dan ikhtisar pelatihan penggunaan perangkat lunak SMART untuk analisis data dan pelaporan dapat ditemukan di situs SMART (www.smartconservationsoftware.org) dan pelatihan rinci untuk menghasilkan output dan analisis dapat ditemukan di Modul Pelatihan Perangkat Lunak SMART.

6. PELAPORAN DAN VERIFIKASI

Meskipun prosedur pelaporan, jadwal dan formatnya akan bervariasi sesuai dengan konteks, minimal perlu melakukan pelaporan kepada masyarakat maupun perusahaan. Melaporkan kembali kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan pedoman dalam Bagian 2 di atas. Apabila masyarakat memilih untuk didukung oleh organisasi pihak ketiga, seperti NGO atau badan pemerintah, ini juga perlu dilaporkan. Kesepakatan atas prosedur pelaporan harus dicapai oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dalam tahap-tahap konsultasi awal, sehingga peran dan tanggung jawab, serta berbagi informasi akan menjadi jelas dan diterima bersama. Hal yang sama juga berlaku apabila prosedur pelaporan dianggap perlu diubah atau diperbaiki berdasarkan kondisi lapangan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang diidentifikasi. Sebuah struktur yang jelas dengan gambaran langkah-langkah untuk melaporkan kembali penting sekali untuk memastikan bahwa peran-peran telah jelas terdefinisi dan poin kontak terbentuk dengan baik.

Sementara laporan harus dilakukan secara rutin dengan Manajer Keberlanjutan perusahaan, Pengelola HCV, Pengelola Lapangan Perkebunan, Koordinator Lapangan dan Tim-Tim Pemantau HCV lainnya, mungkin saja bahwa berdasarkan hasil pemantauan, ada staf lain yang mungkin perlu diajak konsultasi dan dilibatkan setelah pelaporan kembali awal selesai dilakukan. Ini mungkin termasuk, misalnya, petugas keamanan apabila ada laporan tentang intimidasi atau termasuk pekerja perkebunan apabila ada laporan konflik dengan masyarakat. Jadwal pelaporan akan disusun oleh Tim Pemantau bersama-sama dengan masyarakat,

namun disarankan agar pelaporan kembali kepada masyarakat dan perusahaan dilakukan sesegera mungkin setelah pemantauan lapangan.

Karena temuan awal mungkin bersifat subjektif dan didasarkan pada informasi parsial, dan, apabila ancaman atau hilangnya nilai-nilai terungkap, temuan ini mungkin menunjukkan bahwa ada individu atau institusi tertentu bertanggung jawab, perlakuan khusus harus diambil baik untuk melindungi pemantauan dan menghindari fitnah. Tim Pemantau dengan demikian harus terintegrasi ke dalam sistem manajemen sedemikian rupa sehingga data dapat diverifikasi dan dibuat seobjektif mungkin sebelum dibagikan, namun tidak tunduk pada paksaan. Informasi yang bertentangan harus ditriangulasi dengan berbagai anggota masyarakat, komunitas tetangga jika perlu, dan perusahaan.

DRAFT

7. SUMBER-SUMBER LEBIH LANJUT

African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights.

<http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm>

Akwé:Kon Guidelines for the conduct of cultural, environmental and social impact assessments regarding developments proposed to take place on, or which are likely to impact on, sacred sites and on lands and waters traditionally occupied or used by indigenous and local communities. <https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf>

Brown E, N Dudley, A Lindhe, DR Muhtaman, C Stewart and T Synnott (eds) 2013 (October) *Common guidance for the identification of High Conservation Values*. HCV Resource Network. <http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/cg-for-hcv-identification>

Colchester M & S Chao (eds) 2013 *Conflict or Consent? The Palm Oil Sector at a Crossroads*. Forest Peoples Programme & Sawit Watch, Bogor.

Colchester M, P Anderson, N Jiwan, A Darussaamin and A Kiky 2011 *Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the Field Investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia*. RSPO. <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2012/securing-high-conservation-values-central-kalimantan-report-fi>

Colchester M, P Anderson, N Jiwan, Andiko & Su Mei Toh 2008 *HCV and the RSPO: Report of an Independent Investigation into the Effectiveness of the Application of High Conservation Value Zoning in Palm Oil Development in Indonesia*. Forest Peoples Programme, HuMa, Sawit Watch and Wild Asia. <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/rspoinonesiahcvstudyreportoct09eng.pdf>

Daes I 1996 *Supplementary Report of the Special Rapporteur on the Protection of the Heritage of Indigenous Peoples*, UN Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities. 48th Session. E/CN.4.Sub.2/1996/22.

Forest Peoples Programme 2008 *FPIC and the RSPO: A Guide for Companies*. [http://www.rspo.org/files/resource_centre/FPIC%20and%20the%20RSPO%20a%20guide%20for%20companies%20Oct%2008%20\(2\).pdf](http://www.rspo.org/files/resource_centre/FPIC%20and%20the%20RSPO%20a%20guide%20for%20companies%20Oct%2008%20(2).pdf)

Forest Stewardship Council 2012 *The Revised Principles and Criteria V5*. <https://ic.fsc.org/download.revised-fsc-pc-v-5-0-high-resolution.a-1780.pdf>

Indigenous Peoples' and Community Conserved Territories and Areas (ICCAs).

http://www.iccaforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=109

International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination.

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx>

International Covenant on Civil and Political Rights.

<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

International Labour Organisation Convention No. 107 concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries.

[http://www.oas.org/dil/1957_Convention_concerning_Indigenous_and_Tribal_Peoples_ILO_Convention_No_107\).pdf](http://www.oas.org/dil/1957_Convention_concerning_Indigenous_and_Tribal_Peoples_ILO_Convention_No_107).pdf)

International Labour Organisation Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C169

IUCN World Parks Congress official website.

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_events/gpap_wpc/

Official website of the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food.

<http://www.ohchr.org/EN/issues/food/Pages/FoodIndex.aspx>

Principles and Guidelines on Indigenous and Traditional Peoples and Protected Areas. Joint Policy Statement. IUCN - World Conservation Union/WCPA - World Commission on Protected Areas and WWF - World Wide Fund For Nature.

http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/indigenous_people_policy.pdf

Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and Lakes.

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2000/wat/mp.wat.2000.1.e.pdf>

Roundtable on Sustainable Biofuels 2010 Use of Terms for the RSB Principles & Criteria (Glossary).

The right to water and sanitation in international law. The Rights to Water and Sanitation.

<http://www.righttowater.info/progress-so-far/timeline/>

UNESCO Convention on Cultural and Natural Heritage.

<http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>

UNESCO Convention on Intangible Heritage.

<http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention>

United Nations Convention on Biological Diversity. <http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>

United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

<http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>

United Nations Convention on the Rights of the Child.

<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/VG_en_Final_March_2012.pdf

Zrust M, L D'Arcy, L Sadikin, A Suhada, E Hermawan, L Leonard, Rudiyanto, S Wahyudi, R Amin, O Needham & D Priatna 2013 *HCV Monitoring Protocol for Oil Palm Landscapes*. The Zoological Society of London, London.

DRAFT

LAMPIRAN I: CONTOH KUESIONER MASYARAKAT UNTUK KEBUTUHAN DASAR DALAM BERBURU

Kuesioner masyarakat berikut diambil dari unsur-unsur dari tabel di Bagian 3. Kuesioner ini menggunakan hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan sehubungan dengan pemantauan bagaimana kebutuhan pokok dalam berburu dijamin dengan HCV 5 yang ada. Isi kuesioner dan urutan pertanyaan tidak bersifat kaku dan fleksibel untuk disesuaikan dengan berbagai konteks, budaya dan mata pencaharian setempat. Pertanyaan dan isu yang diangkat harus diuji silang lagi bersama masyarakat setelah kegiatan-kegiatan pemantauan, untuk menilai kemajuan terhadap indikator keberhasilan.

Pertanyaan	Tanggapan										
Hewan yang biasa diburu?	Babi hutan	Monyet	Rusa	Ular	Unggas (jenis)	Kanguru	Kasuari	Hewan pengerat	Lainnya	% masing-masing	Tak satu pun
Jenis hewan buruan yang ditangkap meningkat/menurun?	Naik (0 – 50%)	Naik (50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tak satu pun					
Jumlah hewan buruan yang biasa diburu?	Per hari	Per minggu	Per bulan	% masing-masing							
Jumlah hewan buruan yang ditangkap meningkat/menurun?	Naik (0 – 50%)	Naik 50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tak satu pun					
Jumlah hewan buruan yang dibutuhkan untuk menopang satu keluarga?	Per hari	Per minggu	Per bulan	% masing-masing							
Jumlah hewan buruan yang dibutuhkan untuk menopang satu keluarga meningkat/menurun?	Naik (0 – 50%)	Naik 50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tak satu pun					
Jumlah hewan buruan yang ditangkap meningkat/menurun?	Naik (0 – 50%)	Naik (50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tak satu pun					
Ada hewan buruan yang dibatasi atau dilarang?	Babi hutan	Monyet	Rusa	Ular	Unggas (jenis)	Kanguru	Kasuari	Hewan pengerat	Lainnya	Tak satu pun	
Ada hewan buruan yang dibatasi atau dilarang yang kini diburu?	Naik (0 – 50%)	Naik (50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tak satu pun					
Apakah kini juga memburu hewan muda akibat kurangnya hewan buruan?	Tidak	Sedikit	Agak sering	Sering	Lainnya						
Metode berburu yang biasa digunakan?	Senapan	Tombak	Perangkap	Panah	Sumpit	Lainnya	% masing-masing				
Ada metode berburu baru?	Senapan	Tombak	Perangkap	Panah	Sumpit	Bahan peledak	Racun	Listrik	Lainnya	% masing-masing	Tak satu pun
Pola pemanfaatan hewan buruan?	Makanan	Kulit	Bulu	Obat	Lainnya	% masing-masing					
Ada perubahan dalam pola pemanfaatan hewan buruan?	Naik (0 – 50%)	Naik (50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tak satu pun					
Tujuan berburu?	Subsisten	Barter dan perdagangan	Komersial	Keperluan ritual	Lainnya	% masing-masing					
Ada perubahan dalam tujuan berburu?	Naik (0 – 50%)	Naik (50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tak satu pun					
Bagaimana perburuan dipantau/dikelola?	Dikelola oleh masyarakat	Dikelola oleh negara	Dikelola oleh perusahaan	Dikelola bersama	Tidak ada	Lainnya					
Kepuasan dengan model pemantauan/pengelolaan saat ini?	% masyarakat yang merasa sepenuhnya puas	% masyarakat yang merasa puas	% masyarakat yang merasa cukup puas	% masyarakat yang merasa kurang puas	% masyarakat yang merasa sama sekali tidak puas	Lainnya					
Lokasi perburuan?	Hutan	Gunung	Dataran rendah	Rawa	Tepi sungai	Danau	Lainnya				
Ada perubahan dalam lokasi perburuan?	Naik (0 – 50%)	Naik 50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tak satu pun					
Ada gangguan terhadap hewan buruan?	Pencemaran air	Pencemaran suara	Pembalakan	Penambangan	Pembangunan infrastruktur	Pembukaan lahan/penanaman	Perburuan gelap	Lainnya	Tidak ada		
Apa sumber pencemaran air?	Kegiatan di hulu	Pabrik	Penambangan	Pembalakan	Pembangunan infrastruktur	Lainnya					
Apa sumber pencemaran suara?	Kegiatan di hulu	Pabrik	Penambangan	Pembalakan	Pembangunan	Pembukaan	Lainnya				

Protokol Pemantauan untuk Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6

					infrastruktur	lahan/penanaman					
Apa agen sumber pencemaran yang diidentifikasi?	Operasi sektor swasta oleh perusahaan	Operasi sektor swasta oleh perusahaan lain	Proyek pemerintah	Masyarakat lain	Lainnya						
Informasi tentang pemburu gelap?	Nama	Tempat tinggal	Frekuensi kedatangan	Lainnya							
Ada gangguan dari pemburu gelap?	Fisik	Ancaman	Intimidasi	Paksaan	Suap	Penembakan	Tak ada	Lainnya			
Hewan buruan yang biasa diburu pemburu gelap?	Babi hutan	Monyet	Rusa	Ular	Unggas (jenis)	Kanguru	Kasuari	Hewan pengerat	Lainnya		
Frekuensi perburuan gelap?	Per hari	Per minggu	Per bulan	Tidak yakin							
Jumlah hewan yang diburu pemburu gelap?	0	1-5	5-10	10-15	15-20	20+	Tidak yakin				
Pola pemanfaatan hewan buruan pemburu gelap?	Subsisten	Barter dan perdagangan	Komersial	Keperluan ritual	Lainnya	% masing-masing					
Lokasi perburuan gelap?	Hutan	Gunung	Dataran rendah	Rawa	Tepi sungai	Danau	Lainnya	Tidak diketahui			
Pengetahuan tentang ke mana hewan yang diburu secara gelap dikirim/dijual?	Dalam desa	Di desa lain	Di kota	Di kota besar	Ekspor	Tidak diketahui					
Ada lokasi perburuan yang tidak teridentifikasi dalam HCVA?	1 – 3	4 - 6	6 – 9	9 – 11	11+	Tidak ada keikutsertaan dalam HCVA	Tidak ada pengetahuan akan lokasi HCV 5	Tidak			
Kepuasan dengan identifikasi HCV 5 untuk memenuhi kebutuhan berburu?	% masyarakat yang merasa sepenuhnya puas	% masyarakat yang merasa puas	% masyarakat yang merasa cukup puas	% masyarakat yang merasa kurang puas	% masyarakat yang merasa sama sekali tidak puas	Lainnya					
Ada peningkatan penduduk yang mempengaruhi kebutuhan berburu?	Naik (0 – 50%)	Naik 50 – 100%)	Turun (0 – 50%)	Turun (50 – 100%)	Lainnya (100%+ naik atau turun)	Tidak ada					
Ada pembatasan akses ke lokasi berburu di dalam HCV 5?	Tidak	Sedikit	Beberapa	Banyak	Selalu	Tidak yakin di mana lokasi HCV 5	Lainnya				
Jenis pembatasan akses?	Papan pengumuman	Pemagaran	Penanaman pohon	Pembukaan lahan	Pembangunan infrastruktur	Ancaman	Kriminalisasi	Tidak ada	Lainnya		
Ada perambahan ke dalam daerah bukan HCV 5 akibat kurangnya identifikasi HCV 5?	Tidak ada	Sedikit	Beberapa	Banyak	Selalu	Tidak yakin di mana lokasi HCV 5	Lainnya				
Ada rekomendasi model untuk pemantauan dan pengelolaan lokasi berburu?	Pengelolaan oleh masyarakat	Pengelolaan oleh negara	Pengelolaan oleh perusahaan	Pengelolaan bersama	Tidak ada	Lainnya					
Intensitas ancaman terhadap perburuan yang dirasakan?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bukti-bukti ancaman terhadap keamanan pangan akibat kurangnya hewan buruan?	Tidak ada	Kekurangan gizi	Penyakit (dan jenisnya)	Kurang protein	Penyakit atau kondisi lain						
Aksi yang telah diambil sampai saat ini	Oleh perusahaan	Oleh perusahaan lain jika relevan	Oleh badan pemerintah	Oleh masyarakat	Oleh masyarakat lain	Oleh aparat keamanan	Tak satu pun	Lainnya			
Ada konflik dengan komunitas tetangga tentang akses ke lokasi berburu?	Ya	Tidak									
Jenis konflik?	Bersenjata	Ancaman	Intimidasi	Perselisihan	Paksaan						
Apakah konflik berhasil diselesaikan?	Ya	Tidak	Masih dalam proses								

LAMPIRAN II: HCV 5 DAN 6 DALAM KONTEKS NORMA INTERNASIONAL

Tanah, Wilayah dan Sumber Daya

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, ditambah dengan Konvensi ILO Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Asli didasarkan pada pengakuan atas kepentingan tertentu dan nilai-nilai budaya dan spiritual tertentu yang dibutuhkan masyarakat adat pada tanah dan wilayah mereka, yang jauh melampaui nilai moneter sederhana atau nilai produktif mereka. Kedua instrumen ini menetapkan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan prioritas dan strategi untuk pengembangan dan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya mereka. **Konvensi ILO Nomor 107 mengenai Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Penduduk Tribal dan Semi-Tribal Lainnya di Negara-Negara Merdeka** menyatakan bahwa hak kepemilikan, baik kolektif atau individu, dari anggota populasi yang bersangkutan atas tanah yang turun temurun dihuni oleh populasi ini harus diakui. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya kemudian lebih dipertegas dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan regional lainnya seperti **Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi ILO No 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat**. Konvensi Keanekaragaman Hayati mengakui ketergantungan yang erat dan turun temurun dari banyak masyarakat adat dan komunitas lokal yang mengandung gaya hidup tradisional pada sumber daya hayati, dan menyediakan panduan dalam 'Pedoman Akwé:Kon terkait tentang pelaksanaan penilaian dampak budaya, lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan usulan pembangunan pada, atau yang mungkin berdampak pada, situs-situs suci/keramat dan di tanah dan perairan tradisional yang ditempati atau digunakan oleh masyarakat adat dan komunitas.' **Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab dari Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Keamanan Pangan Nasional** menyatakan bahwa pelaku negara dan bukan-negara harus mengakui bahwa tanah, perikanan dan hutan memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, ekonomi, lingkungan dan politik bagi masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang memiliki sistem tenurial adat.

Lembaga perwakilan

UNDRIP memberi masyarakat adat hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan hal-hal yang akan mempengaruhi hak-hak mereka, melalui wakil-wakil yang dipilih sendiri oleh mereka sesuai dengan prosedur mereka sendiri, serta untuk mempertahankan dan mengembangkan institusi pengambilan keputusan mereka sendiri. Hak atas perwakilan yang dipilih sendiri ini ditegaskan dalam **Pedoman Sukarela** yang mensyaratkan negara dan aktor bukan negara untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak dan dengan masyarakat yang terkena dampak. **Konvensi ILO Nomor 169** mensyaratkan negara untuk berkonsultasi dengan masyarakat terkait, melalui prosedur yang layak dan khususnya melalui lembaga perwakilan mereka, kapan saja pertimbangan diberikan terhadap langkah-langkah legislatif atau administratif yang mungkin mempengaruhi mereka secara langsung; membangun cara-cara agar orang-orang ini secara bebas dapat berpartisipasi, setidaknya pada tingkatan yang sama seperti sektor-sektor populasi lainnya, di semua tingkat pengambilan keputusan di lembaga-lembaga pemilihan dan administratif dan badan-badan lainnya yang bertanggung jawab atas kebijakan dan program yang menyangkut mereka dan; membangun cara-cara untuk pengembangan penuh lembaga dan inisiatif masyarakat, dan

dalam kasus-kasus yang tepat memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk tujuan ini. Demikian pula, **Pedoman Akwé:Kon** merekomendasikan bahwa selain perwakilan setiap badan yang dibentuk untuk memberi nasihat tentang dampak tahap-tahap proses penilaian, partisipasi dan keterlibatan yang penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang terkena dampak harus dipikirkan menggunakan model partisipatif dari keterlibatan masyarakat selama pelaksanaan analisis dampak, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan

UNDRIP mensyaratkan negara untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat terkait melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka sebelum penerimaan proyek apapun yang berimbas kepada tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya (dan sama halnya untuk **Pedoman Sukarela**). Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah sering menafsirkan **Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)** dan **Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)** sebagai mengakui hak atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan sebagai ekspresi hak semua bangsa atas penentuan nasib sendiri. **Konvensi ILO Nomor 169** melarang penggusuran dan/atau relokasi penduduk dan suku asli dari wilayah mereka tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka. Standar 'persetujuan dan keterlibatan' dalam **Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD)** juga disamakan dengan hak atas FPIC, dan ditegaskan dalam **pedoman sukarela Akwé:Kon** yang disusun CBD.

Hak atas Pangan

Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan telah menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak atas kecukupan pangan di tingkat nasional, sejalan dengan rekomendasi dari Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ini termasuk kewajiban untuk: menghormati akses yang ada ke kecukupan pangan dan tidak mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan terhambatnya akses tersebut; untuk memastikan bahwa perusahaan atau individu tidak menghilangkan akses individu ke kecukupan pangan; untuk terlibat dengan pro-aktif dalam kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkuat akses masyarakat ke dan pemanfaatan sumber-sumber daya dan sarana/cara untuk menjamin mata pencaharian mereka, termasuk ketahanan pangan. Meskipun semua hak di bawah Kovenan ini dimaksudkan untuk dicapai melalui realisasi yang progresif, negara memiliki kewajiban inti minimum yang membawa efek segera. Mereka memiliki kewajiban untuk mencegah diskriminasi dalam akses ke pangan serta sarana/cara dan hak untuk pengadaannya, atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, usia, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status-status lainnya. Negara kemudian juga dilarang untuk mengambil langkah mundur, yaitu tindakan yang disengaja yang mengakibatkan memburuknya tingkat pemenuhan hak atas pangan saat ini. **Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** juga mensyaratkan negara untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang bebas dari kelaparan dan dapat sesegera mungkin dapat menikmati hak atas kecukupan pangan dan untuk menjamin kepuasan tingkat pokok minimum yang dibutuhkan untuk bebas dari kelaparan. **Pedoman Sukarela** memberikan panduan kepada aktor negara dan bukan negara untuk memperbaiki tata kelola penguasaan tanah, perikanan dan hutan dengan tujuan menyeluruh untuk mencapai ketahanan pangan bagi semua dan untuk mendukung realisasi progresif dari hak atas kecukupan pangan dalam konteks ketahanan pangan nasional.

Pedoman Akwé:Kon merekomendasikan bahwa dalam penilaian dampak sosial, indikator pembangunan sosial yang konsisten dengan pandangan masyarakat adat dan komunitas lokal harus disusun dan harus mencakup aspek-aspek keamanan pangan dan mata pencaharian.

Hak atas Air

Resolusi 64/292 Sidang Umum PBB secara resmi mengakui hak atas air dan sanitasi pada tahun 2010, mengakui bahwa air minum yang bersih dan sanitasi merupakan bagian integral dari realisasi semua hak asasi manusia. Meskipun tidak mengikat dan jauh dari perjanjian tentang hak atas air dan sanitasi, ini tetap merupakan langkah awal dalam arah yang benar. Dalam laporan pertamanya sebagai Pakar Independen tentang Isu Kewajiban HAM Terkait Akses ke Air Minum yang Aman dan Sanitasi, Albuquerque mendefinisikan kaitan yang kuat antara sanitasi dan hak asasi manusia, termasuk hak atas standar hidup yang layak, hak untuk perumahan yang memadai, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas air, hak untuk bekerja, hak untuk hidup, larangan terhadap perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan dan larangan semua bentuk diskriminasi. Pada tahun 2007, Dewan Hak Asasi Manusia mengesahkan resolusi 2/104 yang bertajuk 'Hak Asasi Manusia dan Akses ke Air'. Hak atas air bersih juga tercantum dalam **Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Protokol Air dan Kesehatan untuk konvensi 1992 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Jalur Air dan Danau Lintas Batas**. Komentar Umum Nomor 15 dari Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 2002 menafsirkan **Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** sebagai pembenaran akan hak atas air dalam hukum internasional sebagai hal yang penting untuk perwujudan hak atas standar hidup yang memadai dan hak atas kesehatan.

Pemanfaat Berkelanjutan Secara Adat

Pasal 10c Konvensi Keanekaragaman Hayati mensyaratkan negara untuk melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati secara adat yang sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional yang kompatibel dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan. Hal ini kemudian ditegaskan dalam **Pedoman Sukarela** dan **Pedoman Akwé:Kon**.

Akses dan Pembagian Manfaat/Perlindungan Pengetahuan Adat

Konvensi Keanekaragaman Hayati mensyaratkan negara untuk menghormati, melestarikan dan memelihara pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang mencerminkan gaya hidup tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan para pemegang pengetahuan, inovasi dan praktik tersebut dan mendorong pembagian yang adil dari manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan praktik tersebut.

Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan

Prosedur dan metodologi penilaian dampak yang terkandung dalam **Pedoman Akwé:Kon** memberikan informasi mengenai dampak budaya, lingkungan dan sosial dari pembangunan yang diusulkan dan bagaimana mencegah dampak negatifnya terhadap mata pencaharian masyarakat adat dan komunitas lokal. Prosedur dan metodologi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka kolaboratif yang memastikan keterlibatan penuh masyarakat adat dan komunitas lokal dalam penilaian masalah budaya, lingkungan dan sosial dan kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal dari usulan pembangunan tersebut. Bimbingan juga diberikan tentang bagaimana memperhitungkan pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik

tradisional sebagai bagian dari proses penilaian dampak dan mempromosikan penggunaan teknologi tepat guna.

Monitoring dan sistem informasi berbasis masyarakat

Pedoman Akwé:Kon menyatakan pentingnya bertukar pengalaman dan informasi, termasuk melalui sarana komunikasi tradisional, untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang metode terbaik yang tersedia dan sumber informasi dan pengalaman yang berguna mengenai baik pelaksanaan maupun integrasi masalah terkait budaya, sosial dan keanekaragaman hayati masyarakat adat dan komunitas lokal dalam penilaian dampak lingkungan dan dalam penilaian strategis lingkungan. Lebih lanjut Pedoman tersebut menyarankan agar komunikasi antara praktisi penilaian dan anggota masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengalaman dalam penilaian dampak budaya, lingkungan dan sosial ditingkatkan melalui, misalnya, titik fokus pada Pasal 8 (j) dan ketentuan-ketentuan terkait mekanisme tentang mekanisme *clearing-house* dari **Konvensi Keanekaragaman Hayati**.

Paradigma baru bagi kawasan lindung

Pada **World Parks Congress** yang diselenggarakan di Durban pada tahun 2003, sekitar 5.000 konservasionis yang berkumpul mengumumkan pengadopsian 'paradigma baru' untuk kawasan lindung yang akan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Persetujuan (*Accord*) tersebut merayakan keberhasilan konservasi masyarakat adat. Persetujuan tersebut menyatakan keprihatinan pada kurangnya pengakuan, perlindungan dan penghargaan yang diberikan kepada upaya-upaya ini. Lebih lanjut dinyatakan bahwa ongkos kawasan lindung seringkali ditanggung oleh komunitas lokal. Persetujuan tersebut mendesak komitmen untuk melibatkan masyarakat adat dalam membangun dan mengelola kawasan lindung dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara adil dan setara dalam penghormatan penuh terhadap hak-hak asasi manusia dan sosial mereka. Untuk mengimplementasikan visi baru ini, 'Durban Accord: Action Plan' menyatakan bahwa ongkos keberhasilan masa lalu dalam membangun sebuah sistem kawasan lindung global telah ditanggung oleh komunitas lokal secara tidak adil. Untuk memperbaiki hal ini, sebuah 'hasil' utama yang sekarang berusaha dicapai adalah agar hak-hak masyarakat adat diakui dan dijamin dalam kaitannya dengan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Rencana Aksi yang berkaitan dengan pengakuan dan jaminan hak-hak masyarakat adat tersebut menetapkan tiga sasaran utama: 1) Semua kawasan lindung yang ada dan yang akan ditetapkan di masa depan harus dikelola dan ditetapkan dengan sepenuhnya sesuai dengan hak-hak masyarakat adat, masyarakat nomaden dan komunitas lokal; 2) kawasan lindung harus memiliki wakil yang dipilih oleh masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan mereka harus sepadan dengan hak-hak dan kepentingan mereka; dan 3) mekanisme partisipatif untuk restitusi tanah dan wilayah adat masyarakat adat yang dimasukkan ke dalam kawasan lindung tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka ditetapkan dan diimplementasikan pada tahun 2010.

Wilayah dan Daerah Masyarakat dan Komunitas Adat yang Dilestarikan (ICCA)

Pada **World Parks Congress** ke-5 di Durban tahun 2003, sebuah terobosan dibuat oleh masyarakat adat – dan masyarakat nomaden khususnya – yang secara efektif membuktikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak mereka akan benar-benar memajukan, bukannya melemahkan, hasil-hasil konservasi. Tak lama setelah Kongress di Durban, **Konvensi Keanekaragaman Hayati** pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-7-nya di Kuala Lumpur (2004), menyetujui Program Kerja CBD untuk Kawasan Lindung (PoWPA). PoWPA ini mendukung "pendekatan baru" terhadap kawasan lindung, menyerukan perhatian pada jenis dan kualitas tata kelola, kesetaraan dalam konservasi, dan hak-hak masyarakat adat. Banyak

Resolusi IUCN membuktikan kehendak anggota IUCN untuk mengakui dan mendukung ICCA, termasuk **Resolusi 5,094**, yang diadopsi pada World Conservation Congress bulan September 2012. WCC4 di Barcelona juga menyetujui pedoman teknis IUCN baru untuk kawasan lindung, yang secara eksplisit menyatakan bahwa berbagai jenis tata kelola – termasuk ICCA – dapat sepenuhnya berkontribusi untuk mengembangkan sistem kawasan lindung nasional. **Prinsip dan Pedoman tentang Masyarakat Adat dan Tradisional dan Kawasan Lindung** dari IUCN, Komisi Dunia untuk Kawasan Lindung (WCPA) dan World Wide Fund for Nature (WWF) kemudian mendukung pendekatan baru untuk kawasan lindung ini, mengakui bahwa tidak boleh ada konflik melekat antara tujuan kawasan lindung dan keberadaan masyarakat adat dan masyarakat tradisional lainnya, di dalam dan di sekitar perbatasannya, yang harus diakui sebagai mitra yang sah dan setara dalam pengembangan dan implementasi strategi konservasi yang mempengaruhi tanah, wilayah, perairan, pesisir, dan sumber-sumber daya lain mereka, dan khususnya dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan lindung.

Sifat-Sifat Budaya Benda (*tangible*) dan Bukanbenda (*intangible*)

Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia mensyaratkan agar negara mengakui tugas mereka untuk memastikan identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan transmisi kepada generasi masa depan dari warisan budaya dan warisan alam yang terletak di wilayahnya. Mewujudkan tugas ini, negara harus antara lain mengadopsi kebijakan umum yang bertujuan untuk memberi warisan budaya dan alam sebuah fungsi dalam kehidupan masyarakat dan untuk mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut ke dalam program-program perencanaan yang komprehensif; dan mengatur dalam wilayahnya satu atau lebih layanan untuk perlindungan, pelestarian dan presentasi warisan budaya dan warisan alam apabila layanan dimaksud tidak ada. **Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Bukanbenda**, dengan mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mensyaratkan negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan warisan budaya bukanbenda yang ada di wilayahnya, termasuk melalui identifikasi dan mendefinisikan berbagai elemen dari warisan budaya bukanbenda yang ada di wilayahnya, dengan partisipasi komunitas, kelompok dan organisasi non-pemerintah terkait. Untuk memastikan perlindungan, pengembangan dan promosi warisan budaya bukanbenda yang ada di wilayahnya, setiap negara penandatanganan konvensi harus mengadopsi kebijakan umum yang bertujuan untuk mempromosikan fungsi warisan budaya bukanbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut ke dalam program perencanaan, dan memastikan akses ke warisan budaya bukanbenda tersebut dengan menghormati praktik-praktik adat yang mengatur akses ke aspek-aspek tertentu dari warisan tersebut.